

ISSN online 2723-0996

pISSN:2622-4763



JPPKn

Jurnal Pendidikan **PANCASILA**
dan **KEWARGANEGARAAN**

Volume 2 Nomor 2 Oktober 2021



Diterbitkan oleh:
Program Studi PPKn
Universitas Tanjungpura

Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (JPPKn) Volume 2 Nomor 2 Oktober 2021



ISSN online 2723-0996

pISSN:2622-4763



JPPKn

**Jurnal Pendidikan PANCASILA
dan KEWARGANEGARAAN**

Volume 2 Nomor 2 Oktober 2021



Diterbitkan oleh:
Program Studi PPKn
Universitas Tanjungpura

Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (JPPKn)

Jurnal Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (JPPKn) dengan ISSN 2723-0996 dan merupakan jurnal *Peer-Review* yang diterbitkan oleh Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Jurnal Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (JPPKn) bertujuan untuk mendesiminasikan pemikiran konseptual atau ide, review, dan hasil penelitian terkait Pancasila dan Kewarganegaraan.

Diterbitkan oleh:

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Universitas Tanjungpura

Alamat Penerbit:

Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak, Kalimantan Barat, Kotak Pos: 78124

Telp : 0561(740144)

Hp : 089681943104

Email : jppkn@fkip.untan.ac.id

Website : <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPPKn>

Pimpinan Redaksi

Jagad Aditya Dewantara, Universitas Tanjungpura Pontianak, Indonesia

Dewan Penyunting

Prof. Maswardi H. Amin, M.Pd, Universitas Tanjungpura, Indonesia

Prof. Dr. Yohanes Bahari, M.Pd., Universitas Tanjungpura, Indonesia

Dr. Sulistyarini, M.Si, Universitas Tanjungpura, Indonesia

Dr. Wina Nurhayati Praja, M.Pd, Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

Dr. Hema Fitria, M.Pd, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Pontianak

Efriani, M.Ant, Universitas Tanjungpura, Indonesia

Wibowo Heru Prasetyo, PhD(c), Universitas Muhammadiyah Surakarta

Obby Taufik Hidayat, M.Pd, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

Penyunting Pelaksana

Drs. Rum Rasyid, MM, Universitas Tanjungpura, Indonesia

Thomy Sastra Atmaja, SH., M.Pd, Universitas Tanjungpura, Indonesia

Shilmy Purnama, M.Pd, Universitas Tanjungpura, Indonesia

Mitra Bestari

Prof. Dr. Dasim Budimansyah, S.Pd., M.Si, Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

Prof. Dr. Sapriya, M.Ed, Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

Prof. Dr. Suyahmo, M.Si, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.Pd., S.Ip., M.Si., M.H., Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia

Dr. Mukhamad Murdiono, S. Pd., M.Pd., Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

Dra. Umi Chotimah, M.Pd., Ph.D, Universitas Sriwijaya, Indralaya, Indonesia

Dr. Muhajir, S.Pd., M.Pd, University of Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Dr. Epin Saepudin, M.Pd, Institut Teknologi Bandung, Indonesia
Dr. Eneng Martini, M.Pd, STKIP Pasundan, Indonesia
Dr. Mohammad Mona Adha, S.Pd., M.Pd, Universitas Lampung, Indonesia

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas terbitnya Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (JPPKn) Volume 2 Nomor 2 pada bulan Oktober 2021.

Pada penerbitan ini disajikan lima artikel ilmiah yang terdiri dari (1) Menguatnya Politik Identitas Di Indonesia Baik Karena Faktor Agama, Sosial, Dan Etnis, (2) Relevansi Konsep Negara Dalam Pemikiran Al-Farabi Di Masa Indonesia Sekarang, (3) Peranan Guru Ppkn Dalam Mewujudkan Kelas Sebagai Laboratorium Demokrasi Di MTs Nurul Qolbi Sukasari Kecamatan Sukasari Kabupaten Purwakarta Jawa Barat, (4) Dinamika Masyarakat Kasepuhan Ciptagelar Dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0, dan (5) Peningkatan Kemampuan *Public Speaking* Sebagai Upaya Untuk Menjadi Warga Negara Global Bagi Generasi Muda.

Akhir kata kami mengucapkan selamat membaca dan semoga membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pembaca. Besar harapan kami akan kritik dan saran dari pembaca demi pengembangan pada penerbitan selanjutnya.

Pontianak, Oktober 2021

Pimpinan Redaksi

DAFTAR ISI

	Halaman
MENGUATNYA POLITIK IDENTITAS DI INDONESIA BAIK KARENA FAKTOR AGAMA, SOSIAL, DAN ETNIS Widyawati	66 – 87
RELEVANSI KONSEP NEGARA DALAM PEMIKIRAN AL- FARABI DI MASA INDONESIA SEKARANG Emita	88 – 102
PERANAN GURU PPKN DALAM MEWUJUDKAN KELAS SEBAGAI LABORATORIUM DEMOKRASI DI MTS NURUL QOLBI SUKASARI KECAMATAN SUKASARI KABUPATEN PURWAKARTA JAWA BARAT Eneng Martini , Feniawati Darmana, M. Buhori Muslim	103 – 111
DINAMIKA MASYARAKAT KASEPUHAN CIPTAGELAR DALAM MENGHADAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0 Wina Nurhayati Praja , Silvia Nova Athari , Syifa Nur Alifah	112 – 126
PENINGKATAN KEMAMPUAN <i>PUBLIC SPEAKING</i> SEBAGAI UPAYA UNTUK MENJADI WARGA NEGARA GLOBAL BAGI GENERASI MUDA Asep Rudi Casmana , Dwi Afrimetty Timoera, Iqbal Syafruddin , Adistyana Pitaloka Kusmawati, Muhammad Ageza Pratama, Aldi Wahyu Pradana	127 – 138



MENGUATNYA POLITIK IDENTITAS DI INDONESIA BAIK KARENA FAKTOR AGAMA, SOSIAL, DAN ETNIS

Widyawati

IAIN Ponorogo, Jl. Puspita Jaya, Krajan, Pintu, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo,
Jawa Timur 63492, Indonesia

widyaaa71@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini menjelaskan tentang beberapa identitas nasional yang memiliki gambaran yang membahas tentang politik dan etnis. Pembahasan ini fokus pada dasar membedakan jurnal ini dengan sekripsi atau karya tulis yang sepadan. Sekripsi atau jurnal yang membahas tentang identitas politik banyak yang ikut serta dalam agama dan sekelompok marginal walaupun juga banyak terdapat masalah identitas politik dan etnis yang memiliki tekanan yang lebih pada identitas politik. Pada era reformasi, terdapat partisipasi publik yang semakin meluas dan bebas, di dalam penguatan identitas politik terdapat masalah baru yang hadir. Identitas politik di Indonesia menjadi lebih kuat dan menjadi pilar atas bergulirnya demokratisasi. Setelah selesai mengkaji dan juga menganalisis data, maka dari itu jurnal ini telah berhasil dalam mendapatkan hal-hal yang saling berkesinambungan dengan adanya penguatan dalam identitas politik dan etnis di Indonesia setelah adanya periode baru yang kontribusi antara beberapa pihak memiliki pengaruh, yang terdiri dari kekuatan modal sosial yang telah dimiliki etnis. Di lihat secara eksklusif dalam mendapatkan suatu tempat yang strategis dalam suatu politik baik formal ataupun secara tidak formal.

Kata Kunci: *Sistem Demokrasi, Politik Identitas, Agama, Sosial, dan Etnis*

ABSTRACT

This article describes several national identities that have an overview that discusses politics and ethnicity. This discussion focuses on the basis for distinguishing this journal from similar or equivalent papers. Many secretaries or journals that discuss political identity participate in religion and marginalized groups, although there are also many issues of political and ethnic identity that have more emphasis on political identity. In the reform era, there was widespread and free public participation. In strengthening political identity, new problems were present. Political identity in Indonesia has become stronger and has become a pillar for the rolling of democratization. After completing reviewing and analyzing data, this journal has therefore succeeded in obtaining mutually sustainable matters with the strengthening of political and ethnic identities in Indonesia after a new period in which contributions between several parties have had an influence, which consist of the power of capital sosial ethnic. Seen exclusively in getting a strategic place in a politics, either formal or informal.

Keywords: *Democraton System, Identity Politics, Religion, Social, and Ethnicity*

PENDAHULUAN

Indonesia masuk dalam Negara yang sudah merdeka dan wilayahnya yang sangat luas, sudah dipastikan memiliki identitas agar dapat dikenal dan menjadi pembeda dengan Negara lain. Identitas nasional bisa menjaga kelangsungan dan eksistensi hidup suatu Negara. Maka Indonesia memiliki wibawa dan kehormatan selaku Negara yang setara dengan Negara lain. Identitas nasional digunakan Indonesia sebagai jati diri Negara dari proses kebangsaan yang cukup panjang yaitu semenjak terjadinya masa penjajahan hingga sampai pada masa kemerdekaan.

Tetapi karena adanya perubahan ekonomi, sosial, budaya dan politik yang inhere dalam melakukan perjalanan sejarah untuk menjadi bangsa, dimana tidak mungkin akan terlepas dari konteks berubahnya global dalam perkembangan internasional. Dimana perubahan global ini dilihat dari fukuyama akan dibawa ke perubahan ke ideologi particular kearah ideology universal, dan kondisi inilah kapitalis akan menguasainya. Untuk menghadapi adanya perubahan ini sangat bergantung terhadap kemampuan Negara untuk melawannya.

Dalam Satu Negara untuk melawan pengaruh dari budaya asing akan ada responded an challenge. Apabila challenge memiliki nilai lebih besar dari response bisa dikatakan bangsa tersebut tidak akan mengalami perkembangan dan tidak menjadi Negara kreatif. Maka dari itu agar Negara Indonesia masih tetap ada untuk melawan adanya globalisasi harus tetap membawa kejunjungan tinggi tentang identitas nasional dimana menjadi kepribadian Negara Indonesia yang menjadi dasar perkembangan kreativitas budaya yang globalisasi.

Satu Negara akan memerlukan identitas nasional ataupun jati diri yang berfungsi sebagai penanda dan pengenalan karakter dari Negara tersebut ke Negara yang lain. Satu Negara juga bisa disebut sebagai Negara apabila telah melaksanakan satu identitas nasional atau melakukan pencarian jati diri Negara, karena dengan adanya Negara lain mengakui bahwa setiap Negara di dunia ini mempunyai identitas sendiri yang sesuai dengan sifat, ciri-ciri, keuntungan dan memiliki ciri khas dari suatu Negara.

Penentuan identitas nasional Negara Indonesia, apabila hanya menyebutkan ciri khas fisik saja sangatlah sulit. Diketahui bahwa bangsa Indonesia ini memiliki beranekaragam unsur budaya, ras, dan agama juga memiliki kepribadian yang dari awal memiliki beberapa perbedaan. Cara yang digunakan Untuk mendapatkan pengetahuan tentang identitas

nasional serta karakter Negara Indonesia tidak banyak di fahami melalui cara statis tetapi harus memahami juga melalui pembahasan dinamis. Identitas nasional tidak hanya terdapat pada undang - undang dasar 1945 tetapi termasuk juga kedalam undang-undang nomor 24 tahun 2009, harus lebih mendalam melalui filosofis yang menjadi pembeda Negara Indonesia dan Negara lainnya (Tatu Afifah, 2018. 188).

Politik identitas yang didasarkan pada kesamaan identitas seringkali menjadi penyebab utama munculnya konflik politik terutama berkaitan dengan ketegangan antara kelompok superior dan inferior ataupun antara mayoritas dengan minoritas. Tidak terkecuali di Indonesia, pemahaan mengenai demokrasi liberal yang mengagungkan pancasila di atas segalanya menjadikan agama sebagai substansi yang keberadaannya dianggap sebagai ancaman bagi keragaman yang ada di Indonesia terutama terhadap agama minoritas (Yeni Sri Lestari, 2018). Hal positif yang dapat diambil dari politik identitas adalah ada upaya untuk tetap melestarikan nilai budaya yang menjadi ciri khas kelompok yang bersangkutan, sehingga penguatan akan budaya tidak akan luntur dan hilang (Muhammad Habibi, 2018). Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta kehidupan multikulturalisme di Indonesia, maka identitas nasional, etnis, dan agama memainkan peran yang sangat penting (Tutut Chusniyah, 2016).

Era politik kontemporer saat ini, politik identitas mengancam sikap nasionalisme dan pluralisme yakni sebuah realitas kegamangan yang dialami bangsa Indonesia terkait menguatnya politik identitas (Zahrotunnimah, 2018). Pembentukan identitas dapat terbentuk baik secara parsial maupun secara interaksial. Hal ini yang akan dapat melahirkan perubahan sosial ekonomi, sosial politik, sosial itu sendiri dan sosial budaya. Identitas etnis dan agama adalah dua hal yang menjadi elemen perubahan sosial. Proses terjadinya politik identitas keagamaan akan melahirkan dampak langsung maupun tidak langsung pada perubahan sosial begitupun sebaliknya (Sukamto, 2010).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Melalui metode *library research*. Data-data dalam penelitian ini diambil dari sumber kedua, yaitu sumber buku-buku, e-book, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel, dan opini media cetak lokal yang ada di Indonesia yang diambil melalui *website* dan sumber dokumen

tertulis lain, yang bisa dijadikan sebagai sumber informasi dan data untuk bisa dianalisis dalam penelitian ini.

Penelitian ini juga menggunakan sumber tertulis lain. Yang dimaksud dengan sumber tertulis lain ialah sumber yang bukan dari internet tetapi sumber tersebut terkait dengan masalah penelitian. Media cetak, website, dan sumber dokumen tertulis lain dianalisis melalui pendekatan konten analisis data yang kemudian ditarik kesimpulan dari data tersebut. Penelitian ini juga merupakan penelitian kepustakaan, dimana sumber data yang digunakan meliputi sumber kepustakaan, dokumen, dan informasi. Sumber penelitian ini adalah keadaan politik identitas saat ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Demokrasi

Sistem demokrasi semakin mengalami peningkatan yang cukup drastis karena dimaklumi dari berbagai pihak pemerintahan di Indonesia, justru kenyataannya pemerintahan tidak selalu memberikan keadilan pada masyarakat. Dalam hal ini digunakan untuk menjadi penjamin hak yang seharusnya dimiliki warga Negara, jadi setiap individu memiliki kebebasan didalamnya. Pada dasarnya Indonesia terus bertahan dengan perbedaan tentang keanekaragaman yang dapat mengakibatkan suatu kelompok mengalami perpecahan.

Faktor utama yang menjadi pemicu konflik keragaman di Indonesia seperti konflik antar etnis, konflik budaya, dan konflik antar keyakinan. Konflik tersebut memicu timbulnya konflik antara individu dengan individu yang lainnya. Pemicu tersebut bertambah rumit setelah datangnya suatu kelompok yang mengatasnamakan nasionalisme sebagai anggapan rasa toleransi atas kemerdekaan yang di raih oleh Indonesia. Identitas etnik, ras, keyakinan, dan adat istiadat yang di dominasi oleh kelompok nasionalis.

Perselisihan yang terjadi antara nasionalis dan keyakinan semakin mengganggu kesetabilan Negara. Perbedaan pemahaman antar kelompok mengenai identitas politik dapat melahirkan isu baru di kalangan masyarakat, yang di sebabkan hadirnya persuasi dan tuntutan antar kelompok terhadap kebenaran identitas yang mereka yakini dengan munculnya kelompok pro pemerintah dan kelompok anti pemerintah. (Yeni sri lestari, 2018. 20-21).

Sejarah Politik Identitas dan Nasionalisme Di Indonesia

Salah satu yang menarik terkait politik identitas dan nasionalisme, memberikan pencerahan terkait suatu sejarah politik identitas dan nasionalisme yang berada di Indonesia. Politik identitas dan nasionalisme begitu mendapatkan ruang sangat istimewa dalam beberapa tahun. Baik dalam praktik atau studi keilmuan di bidang politik dan sosiologis. Salah satunya adalah bahwa di dalam setudi pasca kolonial , pada dasarnya politik identitas dan sosiologis sudah ada atau di geluti sejak lama.

Kontribusi dalam hal ini yaitu telah meletakkan politik identitas sebagai ciptaan dalam wacana sejarah dan budayanya. Sedangkan dalam literatur ilmu politik, politik identitas betul betul di pilah untuk membedakan dan memperlihatkan perbedaan yang sangat jelas mengenai apa itu politik identitas dan apa itu identitas politik. Identitas politik sendiri merupakan suatu kontribusi yang menentukan posisi kepentingan subjek. Sedangkan politik identitas merupakan suatu yang mengacu pada mekanisme politik, pengorganisasian identitas, baik dalam identitas politik maupun identitas sosial.

Politik identitas di pahami bahwa dalam pertarungan perebutan kekuasaan politik kian terlihat dalam praktik politik mengalami kemajuan. Apalagi menjelang pesta demokrasi akbar yang dilaksanakan pada tahun 2019 di Indonesia melalui agenda besar bernama PEMILU. Salah satu pakar politik yang bernama Donald L Morowitz (1998) merupakan salah satu pakar politik berasal dari Universitas Duke telah mendefinsikan politik identitas sebagai pemberian garis yang sangat tegas untuk menentukan siapa saja yang akan di ikut sertakan dan siapa yang akan di tolak.

Suatu garis penentuan tersebut tidak bisa di rubah maka setatus baik sebagai anggota mauapunakan terlihat bersifat permanen. Agnes Heller (Abdillah, 2002:22) menggambarkan terkait politik identitas dalam hal ini yang di fokuskan pada suatu pembedaan, dimana suatu kategori utamanya adalah menjanjikan kebebasan, toleransi, dan kebebasan bermainwalau akhirnya memunculkan pola-pola intoleransi, kekerasan dan pertentangan etis. Sehingga pada akhirnya politik identitas dapat mencakup rasisme, bio-feminisme, politik isu lingkungan, dan perselisihan etnis

Nasionalisme muncul sebagai akibat dari banyaknya tanggapan terhadap industrialisasi keterceraian orang-orang dan rupa-rupa ikatan primordial kepada kkerabatan, agama dan komunitas lokal. Dalam catatan suatu sejarah Indonesia dikatakan, bahwasanya peran ideology

nasionalisme dalam politik di Indonesia sendiri di mulai oleh swkelompok pemuda yang tergabung dalam organisasi budi utomo. (Zahrotunnimah, 2018. 93)

Politik identitas di Indonesia sebagian di kutip dalam bukunya politik identitas dan masa depan pluralism Indonesia , di jelaskan bahwa kasus di Indonesia politik identitas lebih terkait dengan etitas, agama ideology dan kepentingan kepentingan lokalyang di wakili pada umumnya oleh para elit politik dengan artikulasi masing-masing. Tentu sangat berbeda pemahaman sejarah nasionalisme di Indonesia dahulu, yang awal mulanya merupakan sebuah ideology, sebgai bentuk perlawanan terhadap kolonialisme yang di mulai dengan penerbitan Koran medan prijaji milik pengusaha pers dan jurnalis pribumi pertama R.M. Oleh karena itu, jika di amati atau di lacak dari sejarah Indonesia politik identitas yang muncul cenderung bermuatan entitas, agama dan ideology politik. Dengan kondidsi Indonesia yang multikulturalisme, maka politik identitas dapat menjadi bahan kajian yang dapat di telaah.

Politik Identitas dan Penguat Demokrasi Lokal

Budaya politik lokal yang sekarang berkembang di Indonesia merupakan warisan sosial yang sudah terbentuk sejak berjalanya sejarah di Indonesia. Budaya terbentuk dari beberapa bagian yaitu kepercayaan, kebiasaan, dan struktur soial yang berkesinam bungan dengan kehidupan politik masyarakat. Adapun batasan terdapat dalam budaya tersebut dapat berasal dari agama, adat istiadat dan juga norma-norma yang sudah berlaku di masyarakat. Budaya tersebut juga dapat dilihat dari condongnya perilaku masyarakat pada kehidupan politik di dalam masyarakat tersebut.

Budaya politik lokal yang berkembang di Indonesia juga memiliki tanggapan adanya tekanan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat. Budaya tersebut mendapat pengaruh dari sistem kultural dan kepercayaan atau agama. Dengan berkembangnya sekelompok komuitas tradisional pada budaya tersebut didalamnya terdapat nilai-nilai positif yang cocok dikembangkan dan dapat dipertahankan dalam pengelolaan sistem birokrasi lokal di daerah.

Pada sistem politik juga akan memberi pengaruh kebudayaan pada setiap daerah, dan berpengaruh juga terhadap bagaimana pola birokrasi yang telah dilaksanakan dan sistem demokrasi, Sistem demokrasi lokal merupakan gambaran bagi budaya politik suatu daerah, dan juga menjadi aspek paling penting karena sistem birokrasi berpengaruh pada seluruh

bidang kehidupan politik di masyarakat. Budaya demokrasi tersebut memiliki hubungan antara budaya politik lokal yang kuat, pertama birokrasi merupakan badan politik, yang ke dua budaya demokrasi mempunyai peranan penting dalam upaya memahami golongan atas dalam politik.

Yang ketiga keberhasilan merupakan pembangunan daerah yang dipengaruhi oleh peranan sistem birokrasi yang dijalankan setempat. Beberapa dalih yang utarakan oleh para informan terkait ada tidaknya suatu tindakan lokal yang dapat mengubah suatu sistem politik lokal, beberapa anggapan melihat bahwa nilai lokal yang masih banyak di gunakan oleh masyarakat. Namun mereka tidak belum percaya atau masih meragukan hal tersebut yang di dasari dengan anggapan bahwa sistem politik yang di gunakan saat ini sudah melupakan hal- hal yang bersifat lokal, seperti tata kelola dan penyelesaian masalah .dalam politik lokal ini menjuru pada sistem tata kelola yang di junjung oleh masyarakat dunia.

Adanya banyak rasa kurang percaya terhadap golongan atas terhadap politik lokal yang masih menjual berita-berita nilai yang lokal guna untuk mendapatkan belas kasih dari warga lokal, di beberapa daerah masih kuat unsur-unsur nilai yang tinggi yang masih kental di kalangan masyarakat. Kesimpulan dapat di ambil bagaimana nilai lokal keutamaan yang sangat memungkinkan suatu perubahan dalam suatu sistem politik. Dampak yang besar dapat mempengaruhi suatu sistem birokrasi yang berada di suatu daerah.

sehingga tidak bisa di hindarkan ketika budaya birokrasi dan budaya politik di setiap daerah itu berbeda tergantung perkembangan budaya politik .berdampak pada pola pikir elit lokal. Yang di percayai oleh masyarakat lokal adalah nilai-nilai kultural, juga sangat berakibat pada pola pikir kelompok atas yang lokal. Ada kejadian di beberapa daerah bahwa melihat penguatan politik identitas di ranah lokal dapat merubah suatu sistem politik. Habodin, Muhtar (2012), memberikan suatu gambaran di beberapa daerah dengan adanya berita lokalisme dapat mengakibatkan menggiyangnya kesetabilan pemerintah.

Dengan adanya berita putra daerah yang harus memimpin dalam suatu daerah membuat beberapa perubahan dalam pemerintahan. Di masa orde baru kepemimpinan di pimpin oleh putra daerah semua di kuasai dan di tentukan oleh pusat, adapun pergerakan yang di lakukan oleh pra kelompok atas lokal. Adapun tingkat kesenjangan masyarakat relatif rendah. Bahwa dalam arena pertarungan tidak dapat di pungkiri

lagi seperti Indonesia yang saling beradu domba, berlomba untuk mendapatkan apa yang di inginkan.

Kelompok atas tentu memanfaatkan situasi ini dimana yang turut menikmati yaitu masyarakat kelas ke bawah, masyarakat berpartisipasi dalam politik yang di gerakkan oleh uang dan menjadi demokrasi Indonesia sebuah rimba politik. Di sini yang banyak uang dialah yang paling menang. Tetapi hal tersebut tidak bisa menjadi jaminan bagi kemajuan bangsa kedepanya. Feodalisme di Indonesia digunakan merujuk pada perilaku yang kurang baik sama dengan perilaku yang kolot, di mana mereka selalu ingin di hormati kemudian bertahan dalam nilai norma yang telah lama di tinggalkan.

Dengan adanya feodalisme menjadikan masalah enggan untuk mengeluarkan pendapat dan mungkin pemikiran yang berbeda apa lagi bertentangan dengan pemikiran orang yang di anggap lebih tinggi jabatannya atau kedudukanya.sebaliknya orang begitu mengabaikan terhadap orang yang di anggap mempunyai posisi yang di nilai lebih rendah dari pada posisinya sendiri. Yang menempati grafik puncak peringkat pola kepemimpinan di Indonesia yakni structural maupun kultural.

Di mana structural dan kultural memposisikan hubungan secara vertikal atara sesama manusia.Sikap putus asa dan skeptis terhadap demokrasi. Penganut teori konspirasi memandang apapun yang ada di dunia ini sudah dirancang sedemikian rupa dan masyarakat dunia menjadi korban atas skenario besar. Demokrasi yang yang di anggap menjadi skenario yang di tawarkan. Masyarakat barat berpendapat yang melahirkan demokrasi mempunyai budaya berbeda budaya Indonesia, bahwa budaya berpengaruh terhadap pelaksanaan demokrasi yang benar.

Setiap budaya dapat dikembangkan oleh demokrasi, kemudian demokrasi tidak akan persis sama dalam lingkungan budaya yang berbeda. Contohnya demokrasi di jepang dan amerika sangat berbeda, jangankan antara budaya barat dan timur demokrasi di inggris dan perancis saja berbeda.Diidentikan bahwa politik praktis memilih kepala daerah yang secara langsung , pemilihan yang di lakukan secara langsung dapat menimbulkan banyak efek, saat itu jalan yang paling baik untuk repressi masyarakat. Kepala daerah dan wakil kepala daerah di pilih langsung oleh DPRD.

Penyelenggaraan hukum pilkada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu tentang pemerintahan daerah. Pemilu di selenggarakan memilih wakil rakyat parlemen ataupun pemimpin eksekutif tingkat

nasional dan lokal seperti presiden dan gubernur. Praktis politik dilakukan oleh setiap politisi yang memberikan kesan yang beragam terhadap masyarakat, janji yang diberikan oleh politis beragam yang mendapat balas kasian dari masyarakat dan mendapatkan apresiasi di tengah-tengah masyrakat.

Dalam penyelenggaraan pemilu harus betul di awasi semua pihak, dan harapan terselenggarakan dengan bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selain itu pemilu juga harus di selenggarakan dengan taat pada asas kepastian hukum, tertip penyelenggaraan pemilu, kepentingan umum, keterbukaan efisiensi, dan efektivitas. Masyarakat mempertimbangkan dalam pemilihan calon pemimpin dengan pertimbangan orang tersebut memiliki perhatian jelas kepada konstituenya tentang perhatian mereka terhadap pemberdayaan orang dan nilai lokal dalam satu acuan dalam memilih, hal tersebut merupakan hal yang wajar dalam memilih menjadi wakil mereka di pemerintahan. Responden mempercayai banyak alasan eksekutif maupun legislative (M. Sirajudin fikri, Nico Oktario A, 2018. 173-17).

Kebangkitan Politik Identitas Islam

Pendekatan pertama, mengargumentasikan primordialisme untuk melihat fenomena agama yang terdapat di dalam kategori sosio-biologis. Dalam pandangan ini di jelaskan bahwa suatu kelompok sosial dikarakteristikan oleh wilayah, agama, kebudayaan, bahasa dan organisasi sosial sebagai hal yang tidak bisa di bantah. Sedangkan secara konseptual, pandangan ini menekankan kehadiran identitas etnik dan agama primordial memiliki fungsi sebagai perekat sebuah komunitas.

Secara definitif para penganut paham primordialisme menekankan pada upaya pencapaian kepentingan yang kolektif untuk di jadikan definisi dan mengartikulasi pandangan secara umum sekaligus untuk membentuk visi untuk masa depan. Pendekatan konstruktifis yang di kembangkan oleh frederik barth. Suatu teori yang memandang suatu identitas agama dan budaya, sebagai hasil dari proses yang kompleks, dan batas-batas yang sangat simbolik kemudian dibangun oleh manfaat mitologi yang situasi kondisi dan tujuan yang ingin di capai. (Endang sari, 2016. 149).

Persaingan Identitas Ekonomi-Politik, Agama dan Etnis

Dalam permasalahan demokrasi harus memperhatikan beberapa faktor yang memiliki keterkaitan dengan faktor ekonomi yang ikut mempengaruhi berjalannya demokrasi di Indonesia. Berdasarkan sejarah nusantara agama islam menjadi mayoritas yang diyakini penduduk Indonesia yang dibawa oleh pedagang arab pada tujuh masehi setelah Indonesia dikuasai india di abad pertama masehi. Kedatangan pedagang india dan arab ke Indonesia yang menjadi pemicu pertama padatnya penduduk di Indonesia dan sampai saat ini semakin berkembang.

Pada masa penjajahan pedagang tionghoa, india dan arab mempunyai peran besar dalam perdagangan di Indonesia, dan yang paling utama terletak di Batavia. Alasan orang cina datang dan menetap di Indonesia untuk menjadi buruh dan pekerja yang di pimpin oleh VOC dan Inggris, lalu orang cina di angkat sttus sosialnya sederajat dengan orang india dan arab oleh belanda yang menjadi penghubung perdagangan dengan Indonesia. Wilayah yang menjadi Pusat perdagangan dan perekonomian para imigran yaitu Jakarta.

Wilayah di Indonesia sebagian diduduki oleh keturunan orang cina, dan diikuti oleh keturunan arab dan india. Keturunan cina dan arab sudah memiliki wilayah sendiri di Jakarta. Kawasan wilayah tersebut di beri nama pecinan. Wilayah yang dipercayai oleh cina untuk ditempati sebagai jalur naga mulai dari Kepala Gading, Sunter, Keramat, Luar Batang, dan Pluit di Jakarta Utara, sampai di Glodok, dan di Jakarta Barat. Bangsa arab mempunyai wilayah sendiri yang terdapat di Condet Jakarta Timur dan Negara India banyak menempati rumah susun Bandar kemayoran Jakarta pusat sebagai tempat tinggal.

Dari segi pendidikan orang Indonesia memilih alasan yang lebih rasional mendidik dan kritis. Untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya 45-50% berpendidikan SLTA dan wilayah sekitar berjumlah 20-25% berpendidikan perguruan tinggi. Survei yang sudah diterbitkan ke public relatif menandakan bahwa faktor suku dan agama tak terlalu berpengaruh. Identitas suku dan agama yang paling utama adalah faktor yang bersifat latin, dan itu semua ada pada masyarakat terutama masyarakat multi kultur seperti Jakarta. Digunakan atau tidak dan berpengaruh atau tidak tergantung pada sejumlah kondisi. (Hanifiya, 2018. 40-44).

Politisme Agama Sebagai Sebuah Fenomena Politik Pasca-Kebenaran: Antara Populisme, Distorsi, Informasi, dan Legitimasi

Pada realitas populistik tidak mungkin jauh dari era pasca-kebenaran. Pembahasan yang dibuat dalam kompetisi politik digambarkan adanya berita-berita tentang menjunjung tinggi hak masyarakat. Jansen (2015) berpendapat bahwa perilaku individu yang menjunjung tinggi hak adalah integritas politik didalamnya ada tokoh-tokoh politik dapat mengarahkan integritas sosial yang tersisihkan lalu menciptakan integritas yang bisa secara giat melaksanakan praktik politik benar adanya dan perdebatan. Dalam hal ini komponen penting yang menjunjung tinggi yaitu mengarahkan dan terkait.

Menjunjung tinggi hak memiliki ciri yang bertabiat normal. Yang pertama yaitu kemampuan yang memiliki arti keadaan yang mewakili dari integritas dapat meninggalkan, yang kedua adalah ada tokoh yang mempunyai kekuasaan, lalu yang ketiga rasa integritas sosial sangat kuat, bisa diketahui melalui kondisi dimana yang seringkali diajukan beberapa pelaku yang berfungsi sebagai 'kita dan mereka' dimana ada batasan suatu integrasi dengan integrasi lainnya, integrasi disini memiliki tabiat yang menghasilkan perbedaan.

Berita tentang menjunjung tinggi hak yaitu berita yang sama dengan keperluan masyarakat umum. Berita tersebut bukan hanya berita yang dipahami oleh kalangan sosial tertentu saja. Berita tentang menjunjung tinggi hak sering kali mengungkapkan berita yang menyangkut keinginan hidup individu banyak. Dengan adanya hal tersebut maka, berita menjunjung tinggi hak sangat mudah mencapai pengertian dan juga selisih massa dari masyarakat umum.

Berfungsi sebagai eksemplar, yang dinamakan gerakan 2019 ganti Presiden ydimana menjadi gerakan yang awal mulanya dibangun sebagai *wake up call* dan peringatan utama tentang "kishruhnya" pemerintahan pada saat ini. Salah satu pembuat gerakan ini yaitu Mardani Ali sera mengatakan *Wake up call* terhadap masyarakat yang beragama muslim di Indonesia supaya tidak berdiam diri saja dalam hal berpolitik menjelang pemilihan presiden tahun 2019. Dengan cara penggunaan kebijakan agama, tidak hanya doktrin-doktrin primer yang ada pada Al-Qur'an ataupun Hadist yang sering kali diambil untuk memperkuat pertahanan kebijakan yang mereka kemukakan.

Para pembangun geraka 2019 Ganti Presiden sering memberikan berita-berita yang menjunjung tinggi hak. Fakta-fakta yang diberikan terhadap masyarakat umum biasanya fakta yang kondisinya terpotong-

potong dan tidak memiliki keseimbangan. Kondisi 2019 Ganti Presiden secara umum pengembangan agama bukan hanya untuk alat politik, tetapi juga untuk mengeluarkan berita-berita politik yang dimana Indonesia menjadi Negara yang *bahaya*. Selain hal tersebut berita tentang hutang Negara, adanya berita yang membuat keadaan bersifat politis yang dimana terdapat fakta persial yang dilihat dari sisi hutangnya saja tetapi sisi yang lain tidak dilihat.

Selain berita tentang tingginya hutang Negara, berita yang membuat keadaan Indonesia bersifat politis yaitu tingginya tingkat tenaga kerja asing yang memiliki pekerjaan diindonesia, padahal jika dilihat dari data statistik surveinya mengatakan bahwa prevalensinya sangat sedikit kemungkinannya jika dibandingkan dengan banyaknya tenaga kerja domestik. Kebijakan presiden dalam mempermudah visa dari tenaga asing dianggap oleh beberapa pihak sebagai bukti presiden berpihak pada tenaga kerja asing. Perbincangan yang diberikan gerakan 2019 Ganti Presiden menuju pada proteksionistik, yang memiliki sifat SARA, dan menghidupkan kembali sistem masyarakat warga Negara dan bukan warga Negara.

Hidupnya kembali pembahasan proteksionis ini sama dengan pembahasan populis Trump dimana hal tersebut menjanjikan bahwa amerika akan bangkit di gunia dengan melaksanakan kebijakan proteksionis dan diskriminatif, dengan cara melaksanakan legitimasi yang cukup subjektif yang mereka anggap sama dengan kepentingan politik mereka.

Aturan informasi juga menjadi salah satu yang mebuat mengerucutnya berita tentang semakin tingginya harga BBM. Banyak media islami yang menjunjung tinggi hak masyarakat terkait kampanye politik milik jokowi tentang kenaikan harga BBM. Dan sebenarnya fakta yang ada yaitu tingginya harga BBM terjadi pada varian BBM pertamax saja yang berfungsi untuk bahan bakar kendaraan kelas sosial yang menengah ke atas. Presiden ditimpakan tuduhan tidak mendukung rakyat kecil. Dengan adanya kemudahan dalam mengakses informasi di era pasca-kebenaran pada saat ini, argument parsial semacam ini sangat mudah viral dan masyarakat umum sangat mudah mempercayai berita tersebut.

Dari pengumpulan masalah-masalah yang memiliki keterkaitan kebijakan sosial dan politik jokowi akhirnya mengikuti gerakan 2019 Ganti Presiden dan menjadi narasi dalam gerakan tersebut tidak hanya fakta yang berhubungan tetapi ketika membacakan narasinya

menggunakan dalil-dalil dimana secara sistematik masuk dalam dalil-dalil tanda bahwa sudah memasuki akhir zaman. Narasi yang disampaikan dalam sosial media instagram menggunakan teger 2019 Ganti Presiden. Tindakan seperti ini merupakan menjadi mentalitas pasca- kebenaran, dimana fakta parsialnya dan opini emosionalnya lebih menonjol dari pada fakta objektifnya (Budi kurniawan, 2018. 145).

Yang menjadi pedoman penunjang kepentingan politik yaitu legitimasi, dalam pembahasan ini yaitu untuk tidak memilih jokowi kembali menjadi presiden jika mencalonkan diri lagi menjadi pemimpin pada tahun 2019. Agitasi dan propaganda politik dijadikan satu dalam bentuk subjektifitas fakta seperti gambaran realitas politik pasca-kebenaran di Negara Indonesia. Yang menjadi poin penting dalam menarik perhatian masyarakat umum dalam mempropagandakan gerakan tersebut dengan menggunakan instrumentalisasi agama.

Tidak hanya berita agama saja tetapi etnisitas dan rumor juga menjadi perbincangan dalam media sosial. Munculnya berita ini membuat timbulnya pertanyaan genealogi etnisitas dan ideology jokowi yang berkaitan dengan komunisme. Gater ganti presiden juga menjadi propaganda berita tentang bangkitnya komunisme yang hadir di Indonesia. Masyarakat Indonesia masih mengalami trauma akibat peristiwa G30S hingga saat ini masih menjadi perdebatan diskusi dikalangan para sejarawan, dipolitisasi dan dieksploritas nalar untuk sebagai kepentingan politik praktis.

Lepas dari interpretasi masyarakat Indonesia yang memiliki kaitan dengan komunisme dimana masih terasosiasikan dengan menggunakan ateisme. Peristiwa ini menghasilkan keuntungan individu yang masuk dalam kelompok islamis, dimana masyarakat Indonesia dimanfaatkan untuk kepentingan politik Negara. Dengan adanya hal tersebut berita tentang ideologi dicampurkan dengan interpretasi sosial-agama yang menjadi strategi politik untuk kelompok oposisi kepada golongan nasionalis.

Adanya penggunaan pola kasus-kasus yang ada, dapat dilihat bahwa politisasi agama di Indonesia pada saat ini politik dapat dilacak menggunakan analisis pasca-kebenaran. Analisis untuk realitas politik yang ada saat ini bisa menggunakan konsep popualisme yang di kolaborasi dengan informasi distortif, persial maka akan menjadi legitimasi akibat politisasi agama dimana dilakukan para kaum yang berkepentingan. Hal ini berhubungan dengan pengalaman Negara

Indonesia dalam kasus politisasi agama yang terjadi dalam Negara tersebut (Budi Kurniawan, 2018. 145-148).

Kebangkitan Politik Identitas Islam Pada Arena Pemilihan Gubernur Jakarta

Secara teoritis politik identitas merupakan ssuatu yang bersifat hidup atau ada dalam setiap etnis, di mana keberadaanya bersifat laten dan potensial dan sewaktu-waktu dapat muncul ke permukaan sebagai kekuatan politik yang dominan. Momentum pilkada yang berada di Jakarta telah memperlihatkan beberapa berita yang berkaitan dengan kampanye yang mana kampanye tersebut menguras energi bangsa bukan hanya publik Jakarta akan tetapi juga melibatkan masyarakat Indonesia, diantaranya kasus yang berkaitan dengan surah Al Maidah ayat 51 yaitu pada sebuah organisasi masyaraat di berbagai daerah di Indonesia dating ke Jakarta untuk melakukan aksi demo, karena adanya opini yang mengatakan bahwa 'Saya Muslim, saya memilih pemimpin yang muslim'.

Orang muslim pada saat itu menjadi pusat perhatian karena orang muslim memilih pemimpin harus muslim. Orang muslim tersebut akhirnya menjadi salah satu orang yang sedang menjadi tema perbincangan di publik dalam pemilihan gubernur Jakarta yang di umumkan di setiap jumat dan juga pada berbagai kegiatan keagamaan. Akhirnya banyak kalangan yang memberi kesimpulan bahwasanya Indonesia mengalami konflik baru diantaranya negara dan agama, yang utama berkaca pada tingginya politik dalam pemilihan gubernur di Jakarta.

Kasus yang pertama yaitu perdebatan yang menyinggung relasi agama dan negara yang sekarang sedang terjadi dan di perdebatkan oleh dua tokoh yang menjadi imbas dari polemik di awal kemerdekaan. Perdebatan yang dilakukan keduanya yaitu tentang negara Republik Turki tahun 1923, soekarno memuja kemunculan Mustafa Kamal Atatuek karena menjadi lambang modernisasi islam, yang mana dapat menjadi pemisah antara agama dan negara dan menurut Natsir itu menjadi kesalahan. Pada tahun 1940 mereka melakukan perdebatan lewat catatan di majalah panji islam.

Dalam golongan nasionalis sekuler yang di jadikan sebagai wakil yaitu Soekarno dan pada golongan nasionalis islami Natsir yang dianggap sebagai wakil. Menurut pandangan dari golongan nasionalis sekuler menjadi wakil bahwasanya agama harus di pisahkan karena yang di ajarkan dalam agama tidak dapat menuntaskan rumitnya masalah negara.

Dalam golongan ini yakin bahwa hanya ritual yang di butuhkan agama bukan urusan kebijakan. Dalam keyakinan kelompok nasionalis islami bahwasanya agama dan negara tidak dapat di pisah di karenakan urusan agama terikat dengan persoalan di negara. Di dalam kelompok ini tidak semua hubungan yang di jalin antara manusia dengan tuhanya dan juga urusan manusia dengan manusia menjadi urusan agama di dalam sebuah politik di negara.

Pada sidang tim 9 Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang biasa di sebut dengan (BPUPKI) melanjutkan perdebatanya yang terdiri dari beberapa anggota yang membahas tentang islam itu di perlukan atau tidak dalam dasar negara. dalam perdebatan tersebut mencetuskan 'pagam jakarta' yang telah di catat dalam sejarah pada tanggal 22 juni 1945 yang telah menjadi gagasan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan juga pancasila yang menjadi dasar negara, dengan menghapuskan poin pertama yang di dalamnya terdapat kewajiban pelaksanaan syariat bagi para pemeluknya yang telah melampaui perdebatan yang sangat sulit.

Kasus yang kedua membeberkan tentang konflik antara negara dengan agama dan adanya kehadiran Negara Islam Indonesia (NII) pada tahun 1949 yang mula-mula di munculkan oleh teman indekos Soekarno dan Kartosuwiryo. Negara Islam Indonesia di kenal dengan sebutan Darul Islam atau biasa di sebut DI yang mempunyai arti Rumah Islam Gerakan ini mempunyai tujuan Indonesia di jadikan sebagai negara teokrasi dan islam menjadi dasar negara. proklamasi telah menegaskan bahwasanya " Hukum yang berlaku dalam Negara Indonesia adalah Hukum Islam ", dan telah di cetuskan dalam Undang-Undang bahwa "Negara berdasarkan Islam" dan juga "Hukum yang paling tinggi yaitu Al Qur'an dan Hadist".

Dalam proklamasi di Indonesia telah ditegaskan dengan menyatakan adanya kewajiban negara dimana Undang-Undang yang menjadi landasan syari'at islam serta perlawanan terhadap ideologi selain Al-Qur'an dan Hadist Sahih yang biasa disebut dengan "HukumKafir" yang mempunyai keterkaitan dengan Al-Qur'an Surah Al-Maidah, ayat 145. Kasus yang ketiga yaitu momentum dengan munculnya beberapa partai islam yang menjadi tanda sejak periode baru tahun 1998 yaitu Partai Keadilan, PBB, Partai Persatuan, PPP, Masyumi, PNU, Partai Kebangkitan Umat (PKU), Partai Cinta Damai (PCD), Partai Abut Yatama (PAY), PSII-1905, PAN, Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia (SUNI), PKB.

Walaupun partai islam tersebut tidak mendapat voting terbesar, akan tetapi kaukus poros yang mereka lalui telah menghalangi aliran dan sejumlah politikus nasionalis serta koalisinya dan juga beberapa tokoh utama yang muncul pada posisi yang strategis pada suatu badan eksekutif dan legislatif. Amin Rais yang menjadi ketua DPR-RI sekaligus Gus Dur sebagai presiden. Pada era reformasi merupakan yang memungkinkan adanya keterbukaan orang yang mengekspresikan termasuk keberagamaan. Dengan di tandai dengan sejumlah ormas islam yang melakukan penegakan syariah.

Selain sangat kental dengan simbolnya yang lebih mengandalkan gerakannya intik unjuk kekuatan untuk melawan suatu hal yang tidak di jumpai banyak orang sebelumnya, dan yang dirugikan atas pembenaran dan tindakan yang mengatasnamakan dirinya sebagai agama yang dapat menarik gerakan organisasi yang mampu menarik perhatian media massa dengan sangat luas. Sejak inilah islam banyak di kenal lebih pada gerakannya di Indonesia. Di orde baru jatuhnya pemerintahan yang otoriter korup membawa harapan yang memunculkan pemerintahan pada masa orde baru yang demokratis, hal tersebut mencerminkan kebebasan mendirikan partai politik.

Secara umum partai politik islam setelah reformasi mempunyai dua aliran yang berbeda tetap saling bertentangan, aliran yang pertama menganut bahwa syariah islam harus di terapkan dalam pemerintahan. Partai besar yang terlibat adalah partai bulan bintang, partai keadilan sejahtera, partai persatuan pembangunan. Aliran kedua menolak syariah islam dalam sistem pemerintahan. Aliran ini dianut oleh dua partai islam yang cukup besar yaitu partai amanat nasional dan partai kebangkitan bangsa. Untuk babak selanjutnya pilkada Jakarta memomentum ke keawatiran sebagian kalangan, simbolisasi dari kebangkitan politik identitas agama dan gerakan islam Indonesia dan negara yang akhirnya memenangkan pilkada.

Primordialisme mengargumentasikan fenomena agama dalam kategori sosio-biologis, pandangan ini berpandangan bahwa suatu kelompok sosial di karakteristik oleh gambaran wilayah, agama, kebudayaan, bahasa dan organisasi sosial. Pandangan ini menekankan kehadiran identitas etnik dan agama. Para penganut paham primordial menekankan upaya pencapaian kepentingan yang kolektif dan identitas kolektif untuk mendefinisikan pandangan umum saat ini. Pandangan primordial mengemukakan bahwa kepentingan antara individual anggota agama di buat untuk menunjang kepentingan kelompok dan

pimpinannya untuk memperkuat agama sebagai sumber kekuatan sosial (Endang sari, 2018. 145-150).

Identitas Nasional Sebagai Pertimbangan Politik Indonesia Dalam Merespon Aksi Terorisisme

Berita terorisme pada saat ini semakin mengalami perluasan tidak hanya satu Negara tetapi sampai mancan Negara yang membuat penyebaran teroris semakin berkembang pesat lalu menjadi peristiwa global. Penyebab dari peristiwa ini karena adanya masa globalisasi yang mengakibatkan modal, aliran dan para masyarakat mengalami percepatan dalam jaringan teroris. Dalam globalisasi bukan hanya membahas tentang mobilitas barang dan masyarakat saja tetapi membahas tentang pemikiran atau ide baru. Arus globalisasi juga membahas tentang teknologi informasi dan komunikasi yang mengalami perkembangan yang cukup pesat dan mendorong perkumpulan orang bahkan individual untuk mengikuti pemanfaatan keadaan tersebut sesuai dengan kepentingan masing-masing.

Globalisme tidak hanya memberikan kemudahan untuk kebutuhan masyarakat tetapi juga mencetuskan hal yang tidak adil dalam distributive sehingga kejadian ini digunakan untuk dorongan terhadap tindakan fundamentalisme-terorisme. Adapun faktor-faktor yang menjadi pendorong penyebab munculnya tindakan terorisme ialah agama yang sering kali dijadikan legitimasi perlawanan dengan cara meneror. Meskipun tidak selalu menjadi penyebab utama ada faktor lainnya yang sangatlah penting yang harus dipertanyakan saat melakukan pembahasan berita tentang terorisme. Moduse operandi yang dilakukan mulai mengalami perkembangan pada abad ke-21 diakibatkan karena semakin majunya teknologi elektronik, komunikasi, transportasi dan juga berkembangnya ilmu tentang pengetahuan di bidang kimiawi.

Peristiwa yang tragedy 11 September 2001 yang menjadi saksi dimana ada dua pesawat komersial amerika serikat yang menabrak gedung kembar world trade center dan dimana salah satu pesawat yang lain menabrak pentagon, gedung yang menjadi pusat pertahanan Negara amerika serikat tersebut mengakibatkan ribuan warga amerika meninggal da nada yang luka-luka sehingga public dunia tertarik pada peristiwa ini dan amerika serikat marah. Ada beberapa upaya terhadap peristiwa tersebut penahanan dan pengadilan dilakukan kepada sebagian individu dan kelompok yang ada di Negara-negara asia tenggara termasuk Indonesia atas tuduhan persekongkolan dalam pergerakan

terorisme. Hal ini juga membuktikan bahwa kelompok tersebut memiliki hubungan yang rasional antar satu kelompok dan kelompok yang lain dan kelompok-kelompok yang radikal internasional (Hidayat Chusnul Chotimah, 2016. 189-190).

Politik Identitas Terhadap Dinamika Penduduk

Di Indonesia lebih dominan yang berkaitan pada suatu masalah etnisitas, agama, serta ideologi dan pelaku lokal yang berkepentingan melalui perluasan daerah. Berita yang digunakan para pelaku lokal dalam ketidakadilan dalam membangun politik bargaining. Yang di jelaskan pada setiap kesempatan. Akan tetapi target para pelaku lokal telah di anggap hanya menjadi naluri untuk memimpin suatu kelompok demi mencapai tujuan ekonomi, politik. Yang menjelaskan bahwa desentralisasi merupakan faktor penentu munculnya suatu politik identitas dengan besarnya kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat ke daerah di era reformasi membuat mantapnya kedudukan pelaku lokal atas kekuasaan di arena politik lokal. Praktek politik didesentralisasi mendajikan berita etnisitas, suku, agama, dan golongan sebagai politik dalam meraih kekuasaan. Politik identitas di pengaruhi oleh faktor struktural, dimensi politik utamanya, ketidaksinambungan politik dan etnis.

Menurut suatu wilayah satuan keturunan yang disebut sebagai suku dalam sejarah perkembangan masyarakat berdasarkan keturunan yang di kenal. Pembagian wilayah kekuasaan yang di kontrol oleh belanda memberi kekuasaan antara bukti terhadap penguasaan tanah, pola hubungan sosial yang kemudian diatas namakan kepada kedua masyarakat melalui ungkapan *urang ukan*. Dalam etnis cenderung dijadikan sebagai legitimasi politik untuk meraih kekuasaan, kelompok yang tergabung secara struktural dimanfaatkan oleh pelaku lokal guna mencapai kekuasaan melalui proses politik yang cenderung memobilisasi jaringan melalui identitas yang diciptakan untuk memenangkan pertarungan.

Politik yang mengarah pada etnis cenderung dijadikan sebagai alat oleh pelaku diarena politik untuk mencapai kekuasaan secara struktural dimanfaatkan pelaku lokal guna mencapai kekuasaan melalui identitas etnis serta diciptakan untuk memenangkan pertarungan. Politik identitas dijadikan alat untuk legitimasi politik, ditingkat supra desa. Politik identitas di supra desa menunjukkan bahwa hubungan kepentingan politik diciptakan oleh pelaku di akuisisi oleh kekuatan modal seperti ekonomi,

politik, sosial dan budaya yang meahirkan pelaku politik. Dalam penguasaan aset dan sumberdaya, pembagian kekuasaan, hingga pembangunan pedesaan. Kekuasaan politik di supra desa telah menjadi mekanisme baru pencirian keuntungan bagi pelaku tertentu yang dikenal dengan istilah *rent seeking* (Saradi watna, Rilus A. kinseng, dan sofyam sjaf, 2018. 80-83).

KESIMPULAN

Sistem demokrasi semakin mengalami peningkatan yang cukup drastis karena dimaklumi dari berbagai pihak pemerintahan di Indonesia, justru kenyataannya pemerintahan tidak selalu memberikan keadilan pada masyarakat. Dalam hal ini digunakan untuk menjadi penjamin hak yang seharusnya dimiliki warga Negara, jadi setiap individu memiliki kebebasan didalamnya. Pada dasarnya Indonesia terus bertahan dengan perbedaan tentang keanekaragaman yang dapat mengakibatkan suatu kelompok mengalami perpecahan.

Salah satu yang menarik terkait politik identitas dan nasionalisme, memberikan pencerahan terkait suatu sejarah politik identitas dan nasionalisme yang berada di Indonesia. Politik identitas dan nasionalisme begitu mendapatkan ruang sangat istimewa dalam beberapa tahun. Baik dalam praktik atau studi keilmuan di bidang politik dan sosiologis. Salah satunya adalah bahwa di dalam setudi pasca kolonial , pada dasarnya politik identitas dan sosiologis sudah ada atau di geluti sejak lama. Budaya politik lokal yang sekarang berkembang di Indonesia merupakan warisan sosial yang sudah terbentuk sejak berjalanya sejarah di Indonesia. Budaya terbentuk dari beberapa bagian yaitu kepercayaan, kebiasaan, dan struktur soial yang berkesinam bungan dengan kehidupan politik masyarakat. Adapun batasan terdapat dalam budaya tersebut dapat berasal dari agama, adat istiadat dan juga norma-norma yang sudah berlaku di masyarakat. Budaya tersebut juga dapat dilihat dari condongnya perilaku masyarakat pada kehidupan politik di dalam masyarakat tersebut.

Kebangkitan politik identitas Islam melalui beberapa pendekatan. Pendekatan pertama, mengargumentasikan primordialisme untuk melihat fenomena agama yang terdapat di dalam kategori sosio-biologis. Dalam pandangan ini di jelaskan bahwa suatu kelompok sosial dikarakteristikan oleh wilayah, agama, kebudayaan, bahasa dan organisasi sosial sebagai hal yang tidak bisa di bantah. Sedangkan secara

konseptual, pandangan ini menekankan kehadiran identitas etnik dan agama primordial memiliki fungsi sebagai perekat sebuah komunitas.

Dalam permasalahan demokrasi harus memperhatikan beberapa faktor yang memiliki keterkaitan dengan faktor ekonomi yang ikut mempengaruhi berjalannya demokrasi di Indonesia. Berdasarkan sejarah nusantara agama islam menjadi mayoritas yang diyakini penduduk Indonesia yang dibawa oleh pedagang arab pada tujuh masehi setelah Indonesia dikuasai india di abad pertama masehi. Kedatangan pedagang india dan arab ke Indonesia yang menjadi pemicu pertama padatnya penduduk di Indonesia dan sampai saat ini semakin berkembang Politisme agama sebagai sebuah fenomena politik pasca-kebenaran: antara Populisme, Distorsi, informasi, dan legitimasi. Pada realitas populistik tidak mungkin jauh dari era pasca-kebenaran. Pembahasan yang dibuat dalam kompetisi politik digambarkan adanya berita-berita tentang menjunjung tinggi hak masyarakat. Jansen (2015) berpendapat bahwa perilaku individu yang menjunjung tinggi hak adalah integritas politik didalamnya ada tokoh-tokoh politik dapat mengarahkan integritas sosial yang tersisihkan lalu menciptakan integritas yang bisa secara giat melaksanakan praktik politik benar adanya dan perdebatan. Dalam hal ini komponen penting yang menjunjung tinggi yaitu mengarahkan dan terkait.

Kebangkitan politik identitas islam pada arena pemilihan gubernur Jakarta Momentum pilkada yang berada di Jakarta telah memperlihatkan beberapa berita yang berkaitan dengan kampanye yang mana kampanye tersebut menguras energi bangsa bukan hanya publik Jakarta akan tetapi juga melibatkan masyarakat Indonesia, diantaranya kasus yang berkaitan dengan surah Al Maidah ayat 51 yaitu pada sebuah organisasi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia datang ke Jakarta untuk melakukan aksi demo, karena adanya opini yang mengatakan bahwa 'Saya Muslim, saya memilih pemimpin yang muslim'.

Orang muslim pada saat itu menjadi pusat perhatian karena orang muslim memilih pemimpin harus muslim. Orang muslim tersebut akhirnya menjadi salah satu orang yang sedang menjadi tema perbincangan di publik dalam pemilihan gubernur Jakarta yang di umumkan di setiap jumat dan juga pada berbagai kegiatan keagamaan. Akhirnya banyak kalangan yang memberi kesimpulan bahwasanya Indonesia mengalami konflik baru diantaranya negara dan agama, yang utama berkaca pada tingginya politik dalam pemilihan gubernur di Jakarta.

Identitas nasional sebagai pertimbangan politik Indonesia dalam merespon aksi terorisisme Berita terorisme pada saat ini semakin mengalami perluasan tidak hanya satu Negara tetapi sampai mancan Negara yang membuat penyebaran teroris semakin berkembang pesat lalu menjadi peristiwa global. Penyebab dari peristiwa ini karena adanya masa globalisasi yang mengakibatkan modal, aliran dan para masyarakat mengalami percepatan dalam jaringan teroris. Dalam globalisasi bukan hanya membahas tentang mobilitas barang dan masyarakat saja tetapi membahas tentang pemikiran atau ide baru. Arus globalisasi juga membahas tentang teknologi informasi dan komunikasi yang mengalami perkembangan yang cukup pesat dan mendorong perkumpulan orang bahkan individual untuk mengikuti pemanfaatan keadaan tersebut sesuai dengan kepentingan masing-masing.

Di Indonesia lebih dominan yang berkaitan pada suatu masalah etnisitas, agama, serta ideologi dan pelaku lokal yang berkepentingan melalui perluasan daerah. Berita yang digunakan para pelaku lokal dalam ketidakadilan dalam membangun politik bargaining. Yang di jelaskan pada setiap kesempatan. Akan tetapi target para pelaku lokal telah di anggap hanya menjadi naluri untuk memimpin suatu kelompok demi mencapai tujuan ekonomi, politik. Yang menjelaskan bahwa desentralisasi merupakan faktor penentu munculnya suatu politik identitas dengan besarnya kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat ke daerah di era reformasi membuat mantapnya kedudukan pelaku lokal atas kekuasaan di arena politik lokal. Praktek politik didesentralisasi mendajikan berita etnisitas, suku, agama, dan golongan sebagai politik dalam meraih kekuasaan. Politik identitas di pengaruhi oleh faktor struktural, dimensi politik utamanya, ketidaksinambungan politik dan etnis.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Tatu. 2018. *"Identitas Nasional Ditinjau dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No 24 Tahun 2009"*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 2. Diakses tanggal 15 Januari 2020.
- Lestari, Yeni Sri. 2018. *"Politik Identitas di Indonesia: Antara Nasionalisme dan Agama"*. Jurnal Of Politics and Policy. Vol. 1.
- Zahrotunnimah. 2018. *Sejarah Politik Identitas dan Nasionalisme di Indonesia*. Vol. 2.

- Fikri, M. Sirajudin, Nico Oktario A. *"Politik Identitas dan Penguatan Demokrasi Lokal (Kekuatan Wong Kito dalam Demokrasi Lokal. Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam"*. Vol. 1053
- Sari, Endang. 2016. *"Kebangkitan Politik Identitas Islam pada Arena Pemilihan Gubernur Jakarta. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik."* Vol. 7.
- Sri Astuti Buchari. 2014. *"Kebangkitan Etnis Menuju Politik Identitas"*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hanifiya. 2018. *"Politik Identitas dan Representasi Politik. Jurnal Studi Agama-Agama"* Vol. 1.
- Kurniawan, Budi. 2018. *"Polittisasi Agama di Tahun Politik: Politik Pasca-Kebenaran di Indonesia dan Ancaman bagi Demokrasi."* Jurnal Sosiologi Agama. Vol. 12.
- Chotimah, Hidayat Chusnul. 2016. *"Identitas Nasional dan Normalitas Internasional sebagai Pertimbangan politik Indonesia dalam Merespon Saksi dan Jaringan Terorisme Global. Jurnal Politica"*. Vol. 7.
- Kontona, Saradi dkk. 2018. *"Praktik Politik Identitas dalam Dinamika Politik Lokal Masyarakat. Jurnal Sosiologi Pedesaan"*. Vol. 6.
- Sukamto, 2010. *Politik Identitas (Suatu Kajian Awal dalam Kerangka dan interaksi "Lokalitas dan Globalisasi")*. Jurnal Sejarah dan Budaya Universitas Malang. Vol.2
- Habibi, Muhammad. 2019. *"Analisis Politik Di Indonesia"*. Jurnal Sosial Politik Universitas Mulawarman.
- Chusniyah, Tutut. 2016. *Pengaruh Identitas Nasional, Etnis, dan Agama Terhadap Multikulturalisme dalam Menghadapi Globalisasi di Indonesia. [Http://fppsi.um.ac.id](http://fppsi.um.ac.id)*. Vol.8, No.2. Diakses pada tanggal 18 Mei pukul 15.34



RELEVANSI KONSEP NEGARA DALAM PEMIKIRAN AL-FARABI DI MASA INDONESIA SEKARANG

Emita

Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia

f1221201028@student.untan.ac.id

ABSTRAK

Penulisan ini berfokus pada pembahasan relevansi konsep negara dalam pemikiran Al-Farabi di Indonesia. Di dalam pemikiran Al-Farabi ini negara ideal ialah negara yang dapat berkerjasama antara pemimpin dan masyarakatnya, penulis mengaitkan dengan negara Indonesia ini yang menjunjung tinggi musyawarah. Dimana Indonesia ini merupakan negara kesatuan dengan itu sangat menjunjung rasa kerjasama maupun musyawarah. Indonesia ini Al-Farabi, karena salah satu indikator dari negara ideal Al-Farabi adalah *distribution of power*, yang mana hal ini sangat berkaitan dengan kita Indonesia yang memiliki pembagian kekuasaan dan memiliki hak kordinasi hubungan serta sebagai negara hukum. Kemudian dalam teori ilmu politik yang mana menjadikan trias politika sebagai pembagian eksklusif, legislatif dan yudikatif. Indonesia bukan termasuk pada negara Al-Madinah Al-Fadhilah (negara ideal) tetapi sangat merujuk pada Al-Madinah Al-Fasiqah (negara fasik atau rusak). Metode penelitian yang dipakai adalah kajian literatur dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Prosesnya yakni lebih menganalisis berbagai jurnal, buku, dan internet untuk mengumpulkan data dan informasi. Tujuan penulisan ini ialah agar dapat mengetahui bahwa Indonesia sekarang cenderung berelevansi pada pemikiran Al-Farabi, dimana didalam penulisan ini penulis mengkaji isu-isu Indonesia sekarang yang berkaitan dengan negara-negara rusak didalam pemikiran Al-Farabi. Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, diperoleh hasil bahwa didalam pemikiran Al-Farabi telah mengkonsepsikan beberapa negara lawan dari negara ideal. Beberapa negara ini menurut penulis ada relevansinya dengan isu-isu Indonesia sekarang.

Kata Kunci: *Indonesia, Konsep Al-Farabi, Negara, Persatuan*

ABSTRACT

This writing focuses on discussing the relevance of the concept of the state in Al-Farabi's thought in Indonesia. In Al-Farabi's thought, the ideal state is a country that can cooperate between leaders and their people, the author relates to this Indonesian state which upholds deliberation. Where Indonesia is a unitary state, it highly respects a sense of cooperation and deliberation. Indonesia is Al-Farabi, because one of the indicators of Al-Farabi's ideal state is the distribution of power, which is closely related to us, Indonesia, which has a division of power and has the right to coordinate relations as well as a state of law. Then in the theory of political science which makes the trias politica as



an exclusive, legislative and judicial division. Indonesia is not included in the Al-Madinah Al-Fadhilah state (ideal country) but strongly refers to Al-Madinah Al-Fasiqah (the wicked or corrupt state). The research method used is a literature review using a qualitative approach. The process involves analyzing various journals, books, and the internet to collect data and information. The purpose of this paper is to find out that Indonesia now tends to be relevant to Al-Farabi's thinking, where in this writing the author examines current Indonesian issues related to corrupt countries in Al-Farabi's thought. Based on the research that has been carried out, it is found that in Al-Farabi's thought he has conceptualized several opposing countries from the ideal state. Some of these countries according to the author have relevance to current Indonesian issues.

Keywords: *Indonesia, Al-Farabi Concept, Unity, State*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang besar, dengan negara besar Indonesia tetap menjadi negara satu kesatuan. Dalam arti negara yang diperintahkan atas satu kesatuan, dimana pimpinan satu sebagai pemegang kedudukan tertinggi dengan itu memiliki sebuah kekuasaan penuh didalam pemerintahannya. Hakikatnya negara kesatuan memiliki kewenangan untuk melimpahkan banyak tugas kepada satuan-satuan pemerintah lokal, kabupaten, dan kepada kota-kota. Mempunyai otoritas sepenuhnya negara kesatuan diseluruh wilayah negara meliputi negara dalam setiap bagian, dalam arti bagian-bagian negara tersebut tidak memiliki otoritas asli. Adapun didalam aturan undang-undang yang dibuat parlemen pusat (DPR-RI) yang hanya dapat mengatur pelimpahan wewenang ini, tidak diatur dalam konstitusi (UUD 1945), tetapi pelimpahan wewenang ini dapat ditarik sewaktu-waktu (Simandjuntak, 2015). Sebagaimana menurut Miriam Budiardjo (1982) dalam tulisannya, menuliskan bahwa hakikatnya negara kesatuan memiliki kedaulatan yang tidak dapat terbagi serta tidak dapat dibatasi, yang dijamin dalam konstitusi.

Menurut Ii (1987) bahwa negara kesatuan ini merupakan negara yang sangat kokoh dibandingkan dengan negara yang berbentuk konfederasi atau federal. Dimana menjadi sebuah keuntungan sebagai negara kesatuan yang berupa adanya undang-undang yang seragam, dengan memiliki sebuah aturan yang dapat menyangkut nasib daerah dimana dibuat oleh parlemen pusat secara keseluruhan. Dengan itu sesungguhnya didalam negara kesatuan dimana setiap daerah memiliki peran dalam memperjuangkan masing-masing nasib daerahnya serta dapat berinisiatif untuk daerahnya. Dalam arti hal demikian itu harus terkoordinasi terkonfirmasi oleh pusat, maka lahirnya konsep desentralisasi dan dekonsentrasi yang bertujuan dalam mendelegasikan beberapa tugas dari pemerintah negara kesatuan terhadap daerah-daerah serta terdapat pemerintah daerah yang mengatur daerahnya masing-masing. Didalam negara kesatuan ini terdapat sebuah kekuasaan pemerintahan pusat yang tidak adanya daerah-daerah otonomi (Santoso, 2009). Otonomi ini bukan hanya beriringan dengan negara kesatuan, tetapi otonomi ini memiliki arti lebih luas didalam pengertian umum serta terdapat dogmatis yang ada didalam negara serikat pada negara kesatuan (Amrah Muslimin, 1986).

Negara kesatuan memiliki prinsip, yakni bahwa landasan hukum sebagai patokan dalam menjalankan sebuah pemerintahan di negara ini,

mulai awal Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 dimana hukum nasional menjadi dasar mulai saat itu, sebelum UUD 1945 ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menjadi Lembaga Kenegaraan Indonesia yang menetapkan rancangan UUD yang sebelumnya disusun oleh lembaga kebangsaan yakni Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) 17 Juli 1945 (Santoso, 2009). Serta pada tanggal 17 Agustus menjadi kelahiran Negara Indonesia, dimana UUD 1945 disahkan sehari setelah itu, dengan sudah dipersiapkan yang terdapat didalamnya termuat bahwa bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, dengan kesepakatan bersama oleh pendiri negara pada masa itu, dengan itulah ditetapkan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 1 ayat (1) UUD 1945. Dengan keberagaman dan Indonesia yang besar ini menjadi bentuk negara kesatuan sebagai bentuk negara yang paling tepat sebagai wadah ide persatuan. Istilah Negara Kesatuan atau Negara Persatuan didalam musyawarah BPUPKI yang di terjemahkan bahasa *Eenheidsstaat*, dimana penggunaan kedua istilah itu termuat di UUD 1945 dengan pengertian yang berbeda (Santoso, 2009).

Pada pasal 1 ayat (1) UUD 1945 istilah Negara Kesatuan diterjemahkan dalam bahasa *Eenheidsstaat*. Istilah tersebut terdapat dalam Penjelasan Umum UUD 1945 yakni sebagai berikut: Dalam pembukaan ini menjelaskan bahwa menerima aliran pengertian negara persatuan. Didalam pembukaan ini istilah negara persatuan tidak merujukkan sebuah bentuk negara, melainkan cita-cita moral dan cita-cita hukum. Di mana artinya negara ialah yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya, negara persatuan ialah negara kesatuan bentuk negara yang memiliki keinginan untuk mewujudkan cita-cita moral dan cita-cita hukum. Didalam negara kesatuan tidak mengistilahkan bahwa tidak ada negara dalam negara, yang mana negara tidak terdiri dari negara-negara bagian serta didalam negara dibagi dalam daerah-daerah. Landasan batas dari pengertian otonomi ialah negara kesatuan. Dengan dikembangkan diberbagai peraturan, landasan batas juga yang mengatur mekanisme otonomi terutama tentang keseimbangan antara kesatuan dan tuntutan (Santoso, 2009).

Menjadi negara yang besar memiliki wilayah yang luas, serta menjadi negara kepulauan sebagaimana negara yang terdiri dari bentuk pulau-pulau daerah-daerah dalam melaksanakan pemerintahan, dengan itu Negara Kesatuan Republik Indonesia pada prinsipnya tidak dapat dipisahkan dengan prinsip otonomi daerah atau desentralisasi yang

berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan. Yang menyatakan dalam bunyinya : “Pembagian Daerah Indonesia atas dasar besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan menghayati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa (Santoso, 2009). Kemudian otonomi daerah ini dikuatkan secara terperinci yang diuraikan dalam amandemen UUD 1945, yang berhubungan dengan prinsip negara kesatuan, selain itu terdapat prinsip otonomi daerah yang mana tidak dapat dipisahkan antara pasal 1 ayat (1) UUD 1946 dan pasal 18 UUD 1945 yang diamandemenkan, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia didalam rangkanya yang memperhatikan tujuan pemberian otonomi daerah terhadap daerah, dengan itu pemerintah daerah menyelenggarakan otonomi daerah yang mana hal ini sesuai dengan pertama sistem pemerintahan negara, kedua sub sistemnya, pemerintah pusat yang khususnya menyelenggarakan pemerintahan eksklusif yang sesuai dengan kekuasaan kewenangannya” (Jadidah, 2020).

Negara Indonesia sudah sejak jaman dahulu menjadi negara kesatuan dengan miliki keyakinan untuk mengadakan otonomi daerah, yakni pada masa pemerintahan Jepang, Belanda, Hindia dan bahkan masa kerajaan sampai sekarang ini. Sebagaimana sekitar dua ribu tahun yang lalu di Indonesia telah terdapat pemerintahan misalnya masa kerajaan. Dimana kerajaan yang menjadi penguasa seluruh Kepulauan Nusantara meliputi seluruh wilayah untuk menyatukannya. Terdapat dua kerajaan masa itu yang menjadi kerajaan besar yakni Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sriwijaya, masa itu telah mulai adanya otonomi daerah, walaupun tidak sama dengan bentuknya dengan sekarang, yang masa itu pengaturan pemerintahannya oleh raja besar dan raja kecil. Maka dari itu bentuk negara kesatuan telah menjadi kesepakatan merupakan keyakinan kuat bagi bangsa Indonesia, tetapi selalu mengedepankan kepentingan daerah dalam menjalankan pemerintahan dengan bentuk otonomi daerah pasal 1 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 bergandengan dengan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yakni bahwa bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan prinsip otonomi daerah. Adapun otonomi daerah ini berkembang dengan mengambil perubahan semenjak Indonesia merdeka, bahkan disaat sebelumnya.

Dalam arti pelaksanaan otonomi daerah telah menjadi sebuah keyakinan besar dan kesepakatan bersama bangsa Indonesia, telah

dibuktikan yang mana terdapat didalam undang-undang pertama disahkan Indonesia merdeka yakni Undang-Undang tentang Otonomi Daerah pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah. Pada dasarnya perkembangan politik di negara ini membuat undang-undang terus mengalami perubahan, hal demikian tentu saja sesuai karakter situasi politik yang sampai saat ini terus berkembang dan berubah.

Dahulu terdapat pemikiran Al-Farabi tentang sebuah negara ideal, dimana negara ideal menurut Al-Farabi ini ialah negara yang dapat berkerja sama antara pemimpin dan masyarakatnya bisa kita kaitkan dengan negara Indonesia ini yang menjujung tinggi musyawarah. Tentang Al-Farabi, pada tahun 259 H/ 872 Al-Farabi dilahirkan di kota Wesij. Ceritanya ayah Al-Farabi berasal dari Iran dan menikah wanita yakni Ibunya Al-Farabi, kemudian ayah Al-Farabi menjadi perwira tentara di Turki. Maka hal demikianlah yang menisabkan bahwa Al-Farabi ini sebagai orang Turki. Al-Farabi dikenal sebagai seseorang pemikiran dengan memiliki 14 karir pemikiran filsafat dalam menjembatani pemikiran Islam dan Yunani, terutama filsafat dimana ini sangat gemilang serta ilmu logika, sehingga disematkan sebagai guru kedua (Al-mu'allim tsAni). Al-Farabi ini terpengaruh oleh filsuf yang ternama yakni Aristoteles dan Plato. Dimana Al-Farabi ini sangat aktif dalam berbagai karya tulis, berupa makalah dan esai pendek dimana didalam karyanya ini Al-Farabi mengulas dan mempertemukan pemikiran dari pemikiran filsafat Aristoteles dan Plato (Wiyono, 2016).

Dalam penulisan ini akan membahas relevansi antara konsep negara menurut Al-Farabi dengan negara Indonesia dimasa sekarang, dalam penulisan ini akan mengkaji isu masa sekarang sebagai relevansi dengan konsep negara menurut Al-Farabi. Serta mengenalkan beberapa negara-negara menurut Al-Farabi yang ada kaitannya dengan negara Indonesia. Mengingat bahwa tentang negara ini selalu menarik untuk dibahas, karena mengikuti perkembangan jaman. Seperti di dalam kutipan Said (2019) didalam tulisannya menjelaskan bahwa negara menurut masa kemas yang semakin berkembang sehingga sulit menemukan sebuah konsep negara yang seperti dicontohkan dalam Islam ialah Nabi Muhammad SAW, dimana pada masa pemimpin Nabi masa itu tidak pernah memberikan sebuah aturan sistem kenegaraan yang baku. Maka dari itu sejak dalam sepanjang sejarah pemerintahan dahulu sampai sekarang dan sampai yang akan datang tentunya selalu berubah mengondisikan sesuai keberadaan umat. Maka dari itu didalam

pembahasan akan membahas relevansi Al-Farabi dengan konsep negara kesatuan (otonomi daerah) dimasa Indonesia sekarang.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan mengumpulkan data informasi yang relevan terkait masalah yang dibahas. Teknik pengumpulan data yang digunakan berguna untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Adapun menggunakan metode kajian literatur yang mana dengan melakukan penelitian bahan pustaka. Prosesnya yakni lebih menganalisis berbagai jurnal, buku, dan internet untuk mengumpulkan data dan informasi yang bertujuan untuk mengkaji relevansi negara Indonesia dalam pemikiran Al-Farabi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dahulu terdapat pemikiran Al-Farabi tentang sebuah negara ideal, dimana negara ideal menurut Al-Farabi ini ialah negara yang dapat berkerjasama antara pemimpin dan masyarakatnya bisa kita kaitkan dengan negara Indonesia ini yang menjunjung tinggi musyawarah. Indonesia merupakan negara kesatuan dengan itu sangat menjunjung rasa kerja sama ataupun musyawarah. Seperti dalam kutipan Muhammad Hanafi (2013) yang menjelaskan tentang pengkajian para ulama dan cendekiawan muslim dahulu mengenai musyawarah dan demokrasi dijadikan sebagai tema diskursusnya. Salah satu dalam pembahasannya terdapat dua pendekatan; empiris dan normatif. Terkait itu tatanan empiris ini menganalisa demokrasi yang implementasinya didalam praktik ketatanegaraan dan politik. Sedangkan tatanan normatif ini lebih membahas pada nilai-nilai demokrasi dari aspek ajaran Islam. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis memberi penjelasan bahwa musyawarah memiliki dasar hukum dari itu, baik secara praktik maupun ucapan, serta didalam hadis-hadis menjadi hukum dasar dan mengharuskan untuk musyawarah, dimana hal ini juga berkaitan dengan sistem pemerintahan muslim di Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim menerapkan musyawarah. Yang mana negara kebangsaan kita Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang memiliki prinsip mufakat, musyawarah, serta perwakilan sebagai berbangsa dan bernegara dengan menegakkan kedaulatan rakyat menjadikan musyawarah sebagai suatu hal yang penting dimana dengan musyawarah ini dapat meminimalisir pemimpin yang berlaku zalim (In'amuzzahidin, 2015).

Al-Farabi ini terpengaruh oleh filsuf yakni Plato dan Aristoteles. Disini secara sederhana mencoba menjelaskan Al-Madinah Al-Fadhilah atau *ideal state*, yang merupakan bagaimana sebuah kota negara yang kecil, serta Al-Farabi menyebutkan indikatornya yakni kebahagiaan dunia akhirat. Dapat lihat pengaruh plato dimana seseorang pemimpin yang memimpin sebuah negara yang ideal yang disamakan halnya dengan bahasa tubuh, dan seseorang pemimpin sama dengan hati. Karena hati sebagai pemeran penting jadi apabila hati ini tidak ada maka sebuah negara akan mengalami fase kekeliruan bahkan ada sebuah pepatah mengatakan lebih baik ada pemimpin yang zalim daripada tanpa ada pemimpin dengan demikian bahwa pemimpin sebagai penggerak penentu didalam sebuah negara. Begitupun didalam pemahaman Al-Farabi bahwa seorang pemimpin itu mempunyai kecerdasan spiritual karena masa itu dalam konteks Islam. Kecerdasan spiritual atau disebutnya akal ke-10 Al-Farabi mengidentifikasi bahwa sebuah negara harus dipimpin oleh seorang pemimpin yang dikategorikan dalam tubuh itu seperti hati.

Maka disini bahwa pemimpin sebagai penentu, serta mempunyai hubungan yang sangat erat dengan masyarakat sebagai anggota tubuh yang lain dalam perspektif Al-Farabi beranggapan relasi tubuh, dimana antara satu dengan yang lain itu saling berhubungan dan saling mempengaruhi sehingga diantara anggota tubuh itu sifatnya adalah musyawarah. Indonesia ini Al-Farabi, karena salah satu indikator dari negara ideal Al-Farabi adalah *distribution of power*, yang mana hal ini sangat berkaitan dengan kita Indonesia yang memiliki pembagian kekuasaan dan memiliki hak kordinasi hubungan serta sebagai negara hukum. Kemudian dalam teori ilmu politik yang mana menjadikan trias politika sebagai pembagian eksklusif, legislatif dan yudikatif. Dengan demikian bisa dilihat bahwa Indonesia ini mengikuti Al-Farabi. Al-Farabi juga berpendapat tentang lahirnya negara dari masyarakat kota yang saling bertukar pikiran didalam kebutuhan hidupnya serta atas persetujuan bersama suatu masyarakat. Dimana masyarakat memiliki kepandaian yang berbeda-beda tetapi telah berjanji kepandaian sematamata untuk suatu cita-cita bersama dan negara ialah kebahagiaan.

Pemikiran Al-Farabi tentang politik dimana tujuan politik ini penting untuk implementasi kan di Indonesia terutama para elit politiknya, dan termasuk untuk semua masyarakat yang mencintai Indonesia ini agar dapat membentuk negara yang bersistem ajaran Islam dalam perpolitikannya. Maka dari itu moral menjadi benteng karena

agama sebagai pondasi penting. Apabila tidak adanya agama, maka masyarakat tersebut akan anarkis. Seperti halnya ditertuang didalam sila pertama didalam Pancasila: Ketuhanan yang Maha Esa. Didalam penelitian Al-Farabi ini sangat penting untuk dipahami bahwa dimasa situasi kekacauan politik yang tidak pasti arah pembangunannya, tetapi menjadi agama sebagai jalan keluarnya dengan moral yang baik serta kerjasama musyawarah yang baik. Dimana masyarakat Indonesia yang sekarang mengalami hal serupa. Maka dari itu politik harus diambil peran dari orang-orang yang memiliki moralis yang tinggi. Bukan orang-orang yang oportunistis. Sehingga Indonesia dapat menjadi jati diri sebagai bangsa negara yang besar serta aman rakyatnya sejahtera, dan tentram. Masyarakat Indonesia mengharapkan negara *Baldatun Tayyiban* dimana rakyat dan pemimpinnya saling berkeja sama.

Didalam otonomi daerah, dimana Al-Farabi yang telah membentuk masyarakat memiliki kemampuan masing-masing yang dengan keleluasaan untuk melakukan pengembangan potensinya dengan saling berkeja sama dan memberikan hasil. Pada hakikatnya manusia saling membutuhkan untuk keberlangsungan hidupnya harus saling tolong-menolong dan bertahan hidup. Seperti yang dikatakan Al-Farabi manusia memiliki kemampuan masing-masing dan memiliki peran. Hal demikian sama dengan konsep otonomi daerah yang mana daerah memiliki wewenang dan hak untuk mengatur, mengurus, rumah tangganya sendiri dengan kemampuannya dan daerah berkejasama untuk mewujudkan kesejahteraan daerahnya, dan meningkatkan daerah yang berpotensi serta masyarakat yang mengambil peran dalam partisipasi penting untuk mengontrol pemerintahan (Simandjuntak, 2015). Pemimpin mengutamakan berpikir sehingga menjadi kemampuannya, dengan memanfaatkan potensi, dan kreasi dengan keinginan dalam arti selalu bertanggungjawab dalam pelaksanaan pemerintahan sesuai yang dimaksudkan oleh Al-Farabi mendukung terbentuknya *good governance*. Dimana di negara ideal Al-Farabi ini mengibaratkan sebagai anggota tubuh yang selaras dengan bekerja sama serta memiliki peran masing-masing sesuai dengan kemampuannya sehingga terciptakan negara yang ideal mencapai kebahagiaan bersama-sama dunia akhirat, jadi dapat dilihat menurut Al-Farabi dari beberapa negara, Indonesia bukan termasuk pada negara Al-Madinah Al-Fadhilah tetapi sangat merujuk mengarah pada Al-Madinah Al-Fasiqah (negara rusak atau fasik). Bukan hanya itu Al-Farabi juga mengkonsepsikan beberapa negara lawan dari negara ideal. Dimana beberapa negara ini menurut penulis ada

relevansinya dengan isu-isu Indonesia sekarang. Maka dari itu beberapa negara tersebut beserta paparannya, yakni sebagai berikut:

1. Al-Madinah Al-Jahiliyah (Negara Jahiliyah)

Al-Madinah Al-Jahiliyah ini negaranya orang bodoh, yakni dimana penduduk negaranya tidak mengenal kebahagiaan. Banyak kejengkelan dan kemarahan di negara Al-Madinah Al-Jahiliyah ini. Masyarakatnya saling mengkritik, saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Seperti Menurut Al-Farabi negara merupakan negara yang ideologinya bertentangan dengan kebahagiaan karena tidak mempunyai ideologi yang tinggi. Negara Al-Madinah Al-Jahiliyah bertolak belakang dengan negara Indonesia ataupun tidak ada relevansinya. Karena Indonesia negara yang menjunjung tinggi ideologi sehingga negara. dapat membentuk kerjasama untuk mencapai kebahagiaan.

Adapun pembagian negara Jahiliyah yang dibagi oleh Al-Farabi, dimana apakah ada kaitannya dengan kondisi Indonesia. Yakni sebagai berikut:

a. Al-Madinah Al-Dharuriyyah (Negara Kebutuhan Dasar)

Yakni negaranya memprioritaskan kebutuhan pokoknya sehingga terpenuhi seperti ada tempat tinggal hidup, bisa makan minum, berpakaian dan menikah. Berdasarkan teori di atas jadi menurut penulis bahwa ini bisa termasuk ke Indonesia karena tanpa disadari bahwa negara Indonesia ini rusak dengan masyarakatnya yang memprioritaskan kebutuhan pokoknya, tetapi dalam hal ini masih wajar karena kebutuhan hidup dalam arti tidak melanggar aturan serta masih meyakini agama dan beribadah dengan baik, walaupun Indonesia ini besar dan rakyatnya yang luar biasa banyak sekali, pasti ada tanpa kita ketahui orang-orang yang menghalalkan semua cara untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.

b. Al-Madinah Al-Baddalah (Negara Jahat)

Yakni negara yang penduduknya mencari keuntungannya sendiri menjadikan kekayaan dan kemakmuran sebagai tujuan hidup. Bukan hanya itu pemerintahannya dan rakyatnya juga mementingkan kekayaan materi. Jadi menurut penulis bahwa ini bukan termasuk Indonesia, karena Indonesia negara yang berintegritas tinggi dan seperti sila keempat "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan". Dimana siapa saja boleh menjadi pemimpin dalam memenuhi persyaratan dan dipilih oleh rakyat.

c. Al-Madinah Al-Karimah (Negara Kehormatan, Aristokratik)

Yakni negara gila kehormatan, dengan pencitraan ingin dapat pujian dari negara lain. Dimana rakyatnya perlu uang banyak subsidi besar tetapi kalau ada kesulitan di luar negeri negara ini paling banyak menyumbangkan besar-besaran. Bukan hanya pemimpinnya haknya rakyatnya juga itu gila hormat. Hal ini bukan Indonesia sekali, karena Indonesia membantu negara lain dengan rasa persaudaraan yang tinggi sehingga apa yang berikan bantuannya kepada negara lain biasanya akan kembali ke Indonesia karena saling tolong-menolong yang tinggi.

d. Al-Madinah Al-Khissah Wal Al-Siquut (Negara Rendah dan Hina)

Yakni negara yang hanya bersenang-senang dan berpoya-poya, bersenang dengan kenikmatan dunia, dan kalau waktu libur senangnya setengah mati kalau kerja malas. Berdasarkan ini bukan termasuk negara Indonesia.

2. Al-Madinah Al-Fasiqah (Negara Fasiq)

Al-Madinah Al-Fasiqah ini negaranya orang-orang fasik. Yakni dimana penduduk negaranya sebenarnya mengenal kebahagiaan, tetapi tingkah lakunya dan perilakunya seperti negara bodoh. Padahal negaranya ini sudah kaya, makmur, pemimpinnya sudah filsuf. Bertolak dengan perilaku penduduknya yang selalu mencari persoalan, dan permasalahan. Sebagaimana didalam kutipan (Said, 2019) tentang pengertian Al-Madinah Al-Fasiqah ini menurutnya ialah negara yang sebenarnya menganut pandangan negara ideal (negara utama), penduduknya yang sudah mengenal konsep kebahagiaan, serta telah menyakini kebahagiaan sejati tentang Allah. Dengan hal demikian penulis berpandangan bahwa Al-Madinah Al-Fasiqah, yang berdasarkan teori di atas adanya relevansi dengan Indonesia, apalagi dimasa sekarang (Mutiani, 2020). Dimana masyarakat Indonesia yang sudah menjunjung tinggi kepercayaan agamanya dan telah hampir menjadi bisa disebut negara yang makmur dan kaya dengan pemimpin yang luar biasa, tetapi inilah relevansi ada sebagian dari orang-orang pemerintah yang selalu mencari persoalan, semisalnya dengan kasus kontroversi hilangnya nama Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam Kamus Sejarah Indonesia. Dimana dalam kasus ini Nadiem Makarim sebagai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diujar kesalahan seakan-akan kasus ini ialah kesalahan atau kekeliruan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, bahkan menyebutkan untuk Nadiem Makarim harus mundur karena kasus kamus sejarah, sebagaimana didalam <https://makassar.terkini.id> memaparkan bahwa

Haikal Hassan meminta Nadiem Makarim bertanggungjawab dengan mundur dari jabatannya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atas hilangnya Nama Kiai Haji Hasyim Asy'ari dari Kamus Sejarah Indonesia Jilid I (20 April 2021).

Dari hal demikian menurut penulis bahwa zona pemerintah selalu ingin membuat sebuah persoalan dan saling menjatuhkan, tanpa harus mencari kebenaran. Padahal hal itu tidak seutuhnya kesalahan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, didalam <https://nasional.kompas.com> klarifikasi Nadiem Makarim, menjelaskan bahwa tidak pernah menerbitkan secara resmi Kamus Sejarah Indonesia Jilid I. Dimana dokumen tidak resmi ini yang diedarkan oleh kalangan tertentu dimasyarakat yang mana merupakan salinan lunak (softcopy) naskah yang belum sempurna. Selanjutnya beliau juga mengungkapkan bahwa naskah Kamus Sejarah Indonesia ini disusun sebelum periode kepemimpinan Mendikbud Nadiem Makarim, yang disusun pada tahun 2017. Sedang selama periode kepemimpinan Mendikbud Nadiem Makarim, belum melakukan penyempurnaan serta belum ada penerbitan naskah. Dari kasus tersebut dapat kita lihat bahwa suatu persoalan dapat jadikan sebuah kontroversi yang dapat mempengaruhi masyarakat, masih banyak lagi tanpa kita sadari persoalan-persoalan yang dibuat untuk membuat kontroversi publik.

3. Al-Madinah Al-Dhallah (Negara Sesat)

Al-Madinah Al-Dhallah ini negara yang sesat karena pemimpinnya penipu, kalau pemimpin penipu maka negara menjadi keliru, kekeliruan yang disebut negara sesat. Di sini pemimpinnya membawa kesesatan yang mana menganggap bahwa dirinya sebuah utusan dengan mendapat wahyu kemudian menipu orang banyak dengan ucapan dan perbuatannya. Serta negara sesat ini meyakini bahwa kebahagiaan sejati nanti diakhirat, mereka juga mempercayai Tuhan, tetapi penduduknya keliru salah dalam mempercayai hal-hal yang membawa penduduknya kepada kebahagiaan sejati. Dimana penduduknya ini mengekspresikan dengan khayalan-khayalan dan patung-patung. Pemimpin utamanya di negara ini orang benar-benar dipercaya kemudian kepercayaannya ini menciptakan pendapat sendiri yang disalahgunakan dengan menciptakan pendapat sendiri yang berujung pada penipuan, kepalsuan (Tika Mutiani, 2020). Indonesia bukan negara seperti ini karena Indonesia sangat mementingkan agama dan mempercayai agamanya masing-masing seperti didalam Pancasila sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Dimana Indonesia ini negara

yang memiliki masyarakat yang taat dalam beribadah disetiap agamanya masing-masing.

KESIMPULAN

Negara Indonesia merupakan negara yang besar, dengan negara besar Indonesia tetap menjadi negara satu kesatuan. Yang menjunjung tinggi musyawarah dan mufakat, setiap masyarakat dan pemerintahan berkerjasama dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat. Seperti halnya dengan konsep pemikiran Al-Farabi dimana negara diibaratkan seperti anggota tubuh, yang mana setiap anggota tubuh memiliki peran masing-masing sesuai kepentingannya dalam arti sama-sama berkerjasama untuk mencapai kebahagiaan, dan anggota-anggota ini dipimpin oleh ialah pemimpin yang diibaratkan oleh Al-Farabi ialah hati, apabila hatinya baik maka baiklah seluruh anggota tubuh, begitupun negara apabila pemimpin yang maka masyarakatnya pun berimplikasi baik juga. Menurut Al-Farabi ini ialah negara ideal yang dapat berkerjasama antara pemimpin dan masyarakatnya bisa kita kaitkan dengan negara Indonesia ini yang menjunjung tinggi musyawarah. Dimana Indonesia ini merupakan negara kesatuan dengan itu sangat menjunjung rasa kerjasama ataupun musyawarah.

Maka dari itu penulis berpendapat bahwa pemikiran Al-Farabi ini ada relevansinya dengan Indonesia, dimana Indonesia ini Al-Farabi, karena salah satu indikator dari negara Ideal Al-Farabi adalah *distribution of power*, yang mana hal ini sangat berkaitan dengan kita Indonesia yang memiliki pembagian kekuasaan dan memiliki hak kordinasi hubungan serta sebagai negara hukum (Mahmuda, 2019). Kemudian dalam teori ilmu politik yang mana menjadikan trias politika sebagai pembagian eksklusif, legislatif dan yudikatif. Dengan demikian bisa dilihat bahwa Indonesia ini mengikuti Al-Farabi. Al-Farabi juga berpendapat tentang lahirnya negara dari masyarakat kota yang saling bertukar pikiran didalam kebutuhan hidupnya serta atas persetujuan bersama suatu masyarakat. Dimana masyarakat memiliki kepandaian yang berbeda-beda tetapi telah berjanji kepandaian semata-mata untuk suatu cita-cita bersama dan negara ialah kebahagiaan. Dan Indonesia bukan termasuk pada negara Al-Madinah Al-Fadhilah tetapi sangat merujuk mengarah pada Al-Madinah Al-Fasiqah (negara rusak atau fasik).

DAFTAR PUSTAKA

- Dwianto, A (2018). "Konsep Negara Utama (Al-Madinah Al-Fadhilah) Al-Farabi dan Relevansinya Bagi Negara Indonesia". Skripsi: Lampung: Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- In'amuzzahidin, M. (2015). Konsep Kebebasan dalam Islam. *Jurnal At-Taqaddum*, 7(2), 259–276. <https://doi.org/10.21580/at.v7i2.1206>
- Kautsar, N (2019). "Relevansi Pemikiran Al-Farabi tentang Negara dalam Kitab 'Ara 'Ahl Al-Madinah Al-Fadilah dengan Konsep Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia". Skripsi: Purwokerto: Program Studi Hukum Tata Negara Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam Institut Agama Islam Negeri.
- Mahmuda. (2019). Konsep Negara Ideal/ Utama Menurut Al-Farabi. *Journal of Islamic Thought and Muslim Culture (IJITMC)*, 1(2), 182–198.
- Mutiani, T. (2020). Negara Utama Menurut Al-Farabi (Konsep dan Relevansinya dalam Kehidupan Bernegara Masa Kini). *Jurnal Al-Ijtima'iyyah*, 6(2), 29–42. <https://doi.org/10.24042/ijitp.v1i1.4097>
- Miriam Budiardjo, (1982), *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT. Gramedia.
- Santoso, MA (2009). Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 6 (4), 05.
- Simandjuntak, R. (2015). Sitem Desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional. *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum*, 7(1), 57–67.
- Rahel Narda, (2021). "Mendikbud Nadiem: Kamus Sejarah Disusun 2017 Sebelum Saya Menteri" <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/21/14511171/mendikbud-nadiem-kamus-sejarah-disusun-2017-sebelum-saya-menteri>. (21 April 2021)
- Resti, (2021). "Haikal Minta Nadiem Mundur karena Kamus Sejarah, Netizen Sentil: Disusun 2017, Zaman Siapakah?" <https://makassar.terkini.id/haikal-minta-nadiem-mundur-karena-kamus-sejarah-netizen-sentil-disusun-2017-zaman-siapakah/>. (21, April 2021)

Wiyono, M. (2016). Pemikiran Filsafat Al-Farabi. *Jurnal Substantia*, 18(1), 67–80.
<http://www.substantiajurnal.org/index.php/subs/article/view/167/144>



PERANAN GURU PPKn DALAM MEWUJUDKAN KELAS SEBAGAI LABORATORIUM DEMOKRASI DI MTs NURUL QOLBI SUKASARI KECAMATAN SUKASARI KABUPATEN PURWAKARTA JAWA BARAT

Eneng Martini^{1*}, Feniawati Darmana², M. Buhori Muslim³

^{1,2,3} STKIP Pasundan, Jl. Permana No 32 B, Cimahi 40512, Indonesia

[*eneng.martini13@gmail.com](mailto:eneng.martini13@gmail.com)

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran guru PKN dalam mewujudkan kelas sebagai laboratorium demokrasi, serta kendala yang dihadapi, dan solusi untuk mengatasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa dan guru PPKn di MTs Nurul Qolbi Sukasari Kecamatan Sukasari Kabupaten Purwakarta dan objek penelitian ini adalah peran guru PPKn dalam mewujudkan kelas sebagai laboratorium demokrasi. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi/gabungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Peran guru PPKn dalam mewujudkan kelas sebagai laboratorium demokrasi dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu dari sikap guru yang demokratis, pengkondisian kelas, serta metode dan media pembelajaran yang digunakan. Kendala yang dihadapi adalah faktor dari siswa dan faktor dari luar peserta seperti sarana prasarana pembelajaran yang kurang memadai. Solusi yang dilakukan guru PPKn untuk mengatasi kendala tersebut adalah guru mendekati siswa di luar jam pelajaran, mengingatkan siswa untuk menanamkan sikap demokratis dan guru harus lebih kreatif dalam menggunakan metode dan media pembelajaran. Mewujudkan kelas sebagai laboratorium demokrasi juga harus didukung dengan kondisi kelas yang demokratis, guru PPKn mengkondisikan kelas untuk menciptakan kelas yang kondusif sehingga tercipta kelas sebagai laboratorium demokrasi.

Kata Kunci: Peran Guru, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Laboratorium Demokrasi, Hasil Belajar

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out the role of Civics teachers in realizing the classroom as a democratic laboratory, as well as the obstacles faced, and solutions to overcome them. This research uses a qualitative approach with a case study method. The subjects in this study were PPKn students and teachers at MTs Nurul Qolbi Sukasari, Sukasari District, Purwakarta Regency and the object of this research was the role of



PPKn teachers in realizing the classroom as a democratic laboratory. Data collection techniques used observation, interviews, documentation, and triangulation/combined. The results of the study show that: The role of PPKn teachers in realizing the classroom as a democratic laboratory can be seen from three aspects, namely from the attitude of democratic teachers, classroom conditioning, and the methods and learning media used. The obstacles faced are factors from students and factors from outside participants such as inadequate learning infrastructure. The solution that the PPKn teacher does to overcome obstacles is that the teacher approaches students outside of class hours, reminds students to instill a democratic attitude and teachers must be more creative in using learning methods and media. Realizing the class as a democratic laboratory must also be supported by democratic classroom conditions, PPKn teachers condition the class to create a conducive class so that the class is created as a democracy laboratory.

Keywords: *Teacher's Role, Pancasila and Citizenship Education, Democracy Laboratory. Learning outcomes*

PENDAHULUAN

Sebagai tenaga pendidik Guru tidak lepas dari pandangan masyarakat dalam kehidupannya baik dari segi pakaian, ucapan dan bperilaku. Seiring dengan perkembangan jaman, serta teknologi informasi semakin pesat, kompetensi yang dimiliki oleh guru juga harus semakin meningkat dan menjadi guru yang profesional. Profesionalisme seorang guru dapat ditentukan dengan memiliki keahlian khusus dalam bidang keguruan, karena sebagai profesi seorang guru tidaklah mudah. tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Pasal 8 “guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan mewujudkan tujuan Pendidikan nasional”.

Guru sebagai pendidik mempunyai peran yang sangat signifikan dalam meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan yang ada di sekolah. Guru juga berhadapan serta berinteraksi secara langsung dengan peserta didik sehingga guru dapat mengetahui karakteristik yang dimiliki oleh setiap anak/peserta didik, dengan demikian guru dapat dikatakan sosok utama dalam menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Hidayat, (2017, p. 62) mengatakan bahwa “sebaik apapun kebijakan pendidikan, tanpa ditunjang oleh guru bermutu, maka peningkatan mutu pendidikan tidak akan tercapai seperti yang diharapkan” oleh karena itu guru harus memiliki jiwa pendidik yang handal dan profesional. Dengan demikian guru memiliki tugas peran dan tanggung jawab dalam menjalankan profesinya sebagai seorang guru.

Menurut Winda Sanjaya dalam (Octavia & Sumanto, 2018, p. 25) terdapat 4 peran guru dalam pendidikan:

1. Guru Sebagai fasilitator, guru berperan untuk memudahkan siswa dalam kegiatan proses pembelajaran.
2. Guru sebagai pengelola, guru berperan dalam menciptakan iklim belajar yang memungkinkan siswa dapat belajar secara nyaman.
3. Guru sebagai demonstrator, sebagai demonstrator dapat diartikan guru harus menjadi teladan bagi siswa.
4. Guru sebagai evaluator, guru tidak hanya mengumpulkan informasi tentang berbagai kelemahan dalam proses pembelajaran sebagai umpan balik dalam perbaikan selanjutnya, namun juga melihat sejauh mana siswa telah mampu mencapai tujuan pembelajaran.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa guru harus bisa menjalankan fungsi dan perannya untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan

khususnya pendidikan yang ada di sekolah. Guru di sekolah selain mengajar juga memberikan bimbingan, dorongan, serta arahan dalam membentuk karakteristik peserta didik terutama dalam sikap yang harus dimiliki oleh peserta didik. Sikap atau tingkahlaku yang baik akan memberikan potensi yang berkualitas dalam membentuk peserta didik menjadi warganegara yang baik tentunya berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945. Mukhlis, (2018, p. 1) mengemukakan bahwa "Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki tugas dan peran lebih dari guru mata pelajaran lain" hal ini berkaitan dengan membentuk sikap demokrasi pada peserta didik serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam menjalankan profesinya sebagai seorang guru tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan pada peserta didik, tetapi juga mentransfer nilai-nilai yang diharapkan dapat membentuk perilaku, moral, etika serta akhlak mulia sehingga tertanamnya budi pekerti yang baik pada peserta didik termasuk dalam menanamkan sikap demokrasi.

Sikap demokrasi perlu ditanamkan kepada peserta didik dalam pembelajaran. Sikap demokrasi yang dimiliki peserta didik akan memberikan suasana baru pada pembelajaran karena pada demokrasi itu sendiri terdapat nilai-nilai yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berinteraksi dengan guru maupun dengan peserta didik lainnya, salah satunya yaitu kebebasan berpendapat, dengan adanya kebebasan berpendapat maka peserta didik mempunyai hak untuk mengemukakan argumentasi yang dimiliki oleh peserta didik ketika pembelajaran berlangsung. Pada pendidikan demokrasi, PPKn merupakan salah satu mata pelajaran yang memiliki peran yang sangat penting serta termasuk kategori sebagai mata pelajaran wajib di sekolah yang di dalamnya terdapat nilai-nilai pancasila yang dapat membentuk keperibadian yang baik pada seseorang.

PPKn yang ada di sekolah diajarkan mengenai nilai-nilai demokrasi, dengan demikian mata pelajaran PPKn perlu ditingkatkan dan mengemasnya semenarik mungkin agar peserta didik tertarik pada pembelajarannya, sehingga pembelajaran PPKn tidak terlihat monoton dengan begitu peserta didik ketika mengikuti mata pelajaran PPKn tidak bosan dan peserta didik bisa dengan mudah untuk memahami nilai-nilai demokrasi dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Realita dilapangan di MTs Nurul Qolbi Sukasari pada proses pembelajaran PPKn peserta didik dalam mengamalkan sikap demokrasi

masih terlihat rendah sehingga pembelajaran di dalam kelas peserta didik masih terlihat pasif. Berdasarkan permasalahan yang ditemukan menjadi tantangan bagi guru PPKn dalam menciptakan kelas menjadi aktif, guru harus melakukan pembelajaran yang kreatif dan memberikan dorongan kepada peserta didik agar menjadi semangat dalam belajar khususnya mata pada pelajaran PPKn, sehingga pembelajaran PPKn menjadi efektif dan membuahkan hasil yang stabil.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis metode studi kasus. Menurut Lexy J. dalam (Dinata, 2020, p. 60) mendeskripsikan: Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, tindakan dan sebagainya, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan metode alamiah. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi/gabungan. Peneliti dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diharapkan dapat menemukan data-data yang di perlukan secara akurat untuk mengetahui bagaimana peranan Guru PPKn dalam mewujudkan kelas sebagai laboratorium demokrasi di MTs Nurul Qolbi Sukasari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Seorang guru harus menjadi suri tauladan karena guru dapat dimaknai sebagai seseorang yang harus digugu dan ditiru oleh semua murid dan bahkan masyarakat. Maka secara tidak langsung sikap maupun perilaku guru di kelas dalam proses pembelajaran akan berpengaruh terhadap peserta didik. Mewujudkan kelas sebagai laboratorium demokrasi guru juga harus memahami dalam menciptakan kelas yang demokratis.

Peranan Guru PPKn dalam Mewujudkan Kelas Sebagai Laboratorium Demokrasi di MTs Nurul Qolbi Sukasari

1. Sikap/perilaku guru yang demokratis

Peran guru PPKn di MTs Nurul Qolbi Sikasari dilakukan oleh peneliti mengenai yang mencerminkan nilai-nilai demokratis guru PPKn selalu tersenyum ketika menyambut atau bertemu peserta didik yang baru sampai ke sekolah. Hal ini dibiasakan agar memberi rasa tenang

dan senang bagi peserta didik untuk datang ke sekolah dan mau mengikuti pembelajaran di dalam kelas, penampilan juga dapat memberikan dampak yang baik terhadap peserta didik dimana guru PPKn selalu berpenampilan rapih dan bersih dari segi berpakaian. Pada proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas dimana sebelum pembelajaran dimulai agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir pembelajaran guru sebelum dan sesudah pembelajaran menyuruh peserta didik untuk melakukan berdo'a bersama-sama dengan dipimpin oleh ketua kelas, guru juga bersikap terbuka dan toleransi terhadap peserta didiknya, guru menerima dan menghargai pendapat atau gagasan peserta didik yang disampaikan kepada guru mengenai materi yang diajarkan serta guru melakukan tutur kata yang baik ketika di dalam kelas, bisa dilihat ketika guru menyuruh untuk menghapus papan tulis di depan kelas kepada peserta didik yaitu dengan menggunakan kata yang sopan.

Guru dianggap sebagai model atau panutan bagi siswanya, maka berdasarkan hal tersebut sesuai dengan salahsatu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru yakni, kompetensi personal atau keberibadian guru mampu menjadi intensifikasi bagi subjek yang berarti memiliki kepribadian yang pantas diteladani sebagaimana yang dikemukakan oleh Kihajar Dewantara dalam (Susilo, 2018, p. 35) telah mengatakan bahwa "*ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani*" berdasarkan hal tersebut dimana guru PPKn di depan harus bisa memberikan suri tauladan terhadap peserta didiknya, di tengah guru PPKn harus bisa menciptakan peluang terhadap peserta didik untuk berprakarsa, dan guru PPKn di belakang harus bisa memberikan dorongan kepada peserta didik.

2. Guru dalam menciptakan kondisi kelas yang demokratis

Guru dalam menciptakan kelas yang demokratis ketika pembelajaran kelas, sebelum pembelajaran dimulai guru PPKn selalu melakukan pengelolaan kelas (seperti mengatur formasi duduk, kerapian peserta didik), guru PPKn mengondisikan peserta didik agar kondisi kelas kondusif. hal ini agar peserta didik dalam proses pembelajaran berlangsung serta terjadinya kelas yang aktif. Sebelum pembelajaran dimulai guru menyuruh siswa untuk merapihkan tempat duduk lalu, berdo'a bersama-sama, dan mengecek kehadiran siswa serta mengecek kesiapan siswa untuk memulai pembelajaran. Pada proses pembelajaran

berlangsung guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya, mengeluarkan pendapat atau berargumentasi.

Menciptakan kondisi kelas sebagaimana yang dikemukakan oleh Wian Sanjaya (Hardian, 2015, p. 105) yaitu sebagai berikut:

Guru berperan dalam menciptakan iklim pembelajaran yang memungkinkan peserta didik dapat belajar secara nyaman, dan menyenangkan bagi peserta didik dalam proses pembelajaran, diperlukan pengelompokan kelas yang baik yakni dengan memberikan kelonggaran, ruang dan kesempatan kepada peserta didik.

3. Metode dan media pembelajaran yang digunakan guru dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi di dalam kelas

Metode dan media pembelajaran merupakan kerangka penting untuk mendukung perencanaan pembelajaran yang diharapkan karena metode dan media merupakan pondasi awal untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka secara tidak langsung dunia pendidikan dituntut untuk mengikuti perkembangan jaman. Menurut Aditia (2016, p. 167) "metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk melaksanakan rencana yang sudah di susun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran". Metode yang digunakan oleh guru PPKn di MTs Nurul Qolbi Sukasari yang sering digunakan adalah metode ceramah dan diskusi kelompok. Media yang digunakan yaitu: internet, buku infokus dan sebagainya.

Hambatan-hambatan Guru dalam mewujudkan Kelas Sebagai Laboratorium Demokrasi di MTs Nurul Qolbi Sukasari

Mewujudkan kelas sebagai laboratorium demokrasi di MTs Nurul Qolbi Sukasari, guru menghadapi beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan peran guru dalam mewujudkan kelas sebagai laboratorium demokrasi tersebut. Akibatnya guru kesulitan dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi melalui proses pembelajaran kepada peserta didik.

Kendala-kendala yang dialami oleh guru PPKn di MTs Nurul Qolbi Sukasari yaitu sikap peserta didik seperti peserta didik yang tidak memperhatikan guru menyampaikan materi pembelajaran, ngobrol dengan temannya saat proses pembelajaran berlangsung, bahkan ada yang tidak memasuki proses pembelajaran sehingga tujuan dari pembelajaran tentunya tidak terlaksana dengan baik. Selain itu peserta

didik masih kurang proaktif melalui bertanya meskipun sudah diberikan kesempatan oleh guru untuk bertanya. Kendala lain yang dialami oleh guru adalah sarana prasarana yang kurang memadai.

Solusi yang Dilakukan Guru untuk Mengatasi Hambatan-hambatan dalam Mewujudkan Kelas Sebagai Laboratorium Demokrasi di MTs Nurul Qolbi Sukasari

Solusi merupakan cara yang dapat dilakukan untuk mencari jalan keluar dalam mengatasi masalah yang ada. Guru di MTs Nurul Qolbi Sukasari memiliki solusi untuk mengatasi kendala atau hambatan tersebut. Guru melakukan pendekatan kepada peserta didik di luar jam pelajaran mencari tahu latar belakang peserta didik yang kurang menanamkan nilai-nilai demokrasi. Guru menegur siswa dan memberikan pertanyaan terkait materi pembelajaran yang sudah dijelaskan bagi siswa yang kurang memerhatikan guru pada saat menyampaikan materi pembelajaran dan guru menyuruh siswa yang mengantuk didalam kelas untuk mengambil air wudhu. Guru juga harus lebih kreatif dalam menggunakan metode dan media pembelajaran.

KESIMPULAN

Peran guru PPKn dalam mewujudkan kelas sebagai laboratorium demokrasi di MTs Nurul Qolbi Sukasari dapat dilihat dari tiga aspek *Pertama*, guru telah mencerminkan nilai-nilai demokrasi. *Kedua*, guru telah berupaya untuk menciptakan kelas yang demokratis. Guru telah menggunakan metode pembelajaran dalam mendukung terciptanya kelas yang demokratis. Guru dalam mewujudkan kelas sebagai laboratorium demokrasi terdapat kendala yang dihadapi yaitu faktor dari peserta didik yaitu sikap atau perilaku peserta didik kurang menanamkan nilai-nilai karakter demokratis. Solusi yang dilakukan PPKn guru untuk mengatasi hambatan dari peserta didik, guru melakukan pendekatan terhadap peserta didik yang kurang menanamkan nilai-nilai demokrasi di luar jam pelajaran, guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik yang kurang menanamkan nilai-nilai karakter demokrasi ketika guru menjelaskan materi pembelajaran, guru menyuruh siswa untuk mengambil air wudhu bagi siswa yang mengantuk pada proses pembelajaran dan guru harus lebih kreatif dalam menggunakan media pembelajaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditia, D. Y. (2016). Pengaruh Penerapan Metode Pembelajaran Resitasi Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa. *Junal SAP*, 1(2), 165–174.
- Dinata, H. B. (2020). *Pelaksanaan Budaya Demokrasi Terhadap Pembentukan Karakter Pesrerta didik kelas V SD 1 Pinang Jaya*. Universitas Lampung.
- Hardian, A. (2015). *Peran Guru dalam Membangun Kelas Sebagai Laboratorium Demokrasi Melalui Pembelajaran PPKn di SMP Negeri 2 Depok Sleman Yogyakarta*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Hidayat, R. (2017). Tinjauan Teoritik Tentang Komitmen Organisasi Guru. *Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 1(2), 62–70.
- Mukhlis, A. H. (2018). *Peranan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Dalam Mengembangkan Sikap Warganegara yang Demokratis dan bertanggung Jawab*. STKIP Pasundan Cimahi. Cimahi.
- Octavia, E., & Sumanto, I. (2018). Peran Guru Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membentuk Karakter Disiplin Siswa di Sekolah. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(2), 20–30. <http://journal.ikipgriptk.ac.id/index.php/kewarganegaraan/article/view/20-30>
- Susilo, S. V. (2018). Refleksi Nilai -Nilai Pendidikan Kihajar Dewantara dalam Upaya-Upaya Mengembalikan Jati Diri Pendidikan Indonesia. *Jurnal Cakrawala Pendas*, 4(1), 33–41.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.



DINAMIKA MASYARAKAT KASEPUHAN CIPTAGELAR DALAM MENGHADAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Wina Nurhayati Praja^{1*}, Silvia Nova Athari², Syifa Nur Alifah³

^{1,2,3} Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia

*winapraja@upi.edu

ABSTRAK

Perkembangan digital semakin cepat berbagai lapisan masyarakat sudah kenal yang namanya teknologi begitu pun Desa Kasepuhan Ciptagelar, desa adat yang berada di Kabupaten Sukabumi ini ternyata menerima dengan perkembangan teknologi dan juga mengikutinya seperti yang kita ketahui bahwa Desa Kasepuhan Ciptagelar ini memiliki stasiun Televisi sendiri yang bernama Ciga TV yang berisikan kegiatan-kegiatan Desa Kasepuhan Ciptagelar yang didokumentasi. Desa kasepuhan Ciptagelar ini senang mengerjakan sesuatu dengan bergotong royong seperti mengerjakan pembangkit listrik sendiri atau warga Desa Kasepuhan Ciptagelar adalah Mikro Hidro karena pembangkit listriknya menggunakan turbin. Kepala Desa Kasepuhan Ciptagelar menyebutkan bahwa adat istiadat yang diwariskan oleh leluhur Desa Kasepuhan Ciptagelar ini tidak akan dihilangkan walaupun mereka menerima dengan adanya perkembangan teknologi bahkan mengikuti perkembangan teknologi dan mungkin tidak semua kampung adat yang seperti Desa Kasepuhan Ciptagelar ini yang terbuka menerima adanya teknologi mereka menyesuaikan zaman dan juga tidak melepaskan adat istiadat Desa Kasepuhan Ciptagelar seperti Desa Kasepuhan Ciptagelar menanam padi dan menanamnya menggunakan cara tradisional tanpa alat modern apapun karena tradisi sudah ada saat Desa Kasepuhan Ciptagelar ini ada dengan begitu antara teknologi dan adat istiadat ini seimbangan.

Kata Kunci: Desa Kasepuhan Ciptagelar, Perkembangan Teknologi, Adat istiadat

ABSTRACT

Digital development is getting faster, various layers of society are familiar with technology as well as Kasepuhan Ciptagelar Village, a traditional village located in Sukabumi Regency, in fact it accepts technological developments and also follows it as we know that Kasepuhan Ciptagelar Village has its own television station called Ciga TV, which contains the activities of Kasepuhan Ciptagelar Village which are documented. Kasepuhan Ciptagelar Village likes to do things by working together such as working on their own power plants or Kasepuhan Ciptagelar Village residents are Micro Hydro because the power plant uses turbines. Kasepuhan Ciptagelar Village



Head said that The customs inherited by the ancestors of Kasepuhan Ciptagelar Village will not be eliminated even though they accept the development of technology and even follow technological developments and maybe not all traditional villages such as Kasepuhan Village This Ciptagelar who is open to accepting their technology adjusts to the times and also does not let go of the customs of Kasepuhan Ciptagelar Village, such as Kasepuhan Ciptagelar Village, planting rice and planting it using traditional methods without any modern tools because the tradition existed when Kasepuhan Ciptagelar Village existed in this way between technology these mores are in balance.

Keywords: Kasepuhan Ciptagelarl Village, Technological Development, Customs

PENDAHULUAN

Manusia merupakan bagian dari makhluk sosial yang dimana kehidupannya tidak jauh dengan suatu interaksi. Oleh karena itu, manusia dapat dikatakan tidak dapat hidup sendiri, melainkan saling bergantung dengan yang lain. Menjalani suatu hubungan sosial tidak jauh dari proses interaksi yang kemudian semakin lama membentuk suatu kelompok sosial yang memiliki pemikiran, dan kebiasaan yang sama yang menjadikannya hal itu sebagai suatu budaya dari kelompok sosial tersebut. Terbentuknya kelompok sosial dan budaya yang beragam di Indonesia sendiri memiliki beberapa pengaruh salah satunya yaitu letak geografis dimana pada awalnya budaya tersebut terbentuk dari bagaimana cara kelompok masyarakat tersebut beradaptasi dan memanfaatkan sumber daya alam serta membangun nilai kehidupan tersebut. Kebudayaan menjadi salah satu bagian dari identitas dari anggota kelompok masyarakat budaya tersebut.

Dinamika merupakan salah satu ciri khas atau identitas kehidupan individual, kehidupan kelompok dan kehidupan sosial. Dinamika sosial bersifat universal yaitu terjadi di berbagai tempat, kondisi dan keadaan disetiap masyarakat. Menurut Gillin dan Gillin (1999), "Inovasi merupakan salah satu faktor pendorong dinamika sosial. Masyarakat dan kebudayaan memiliki hubungan dimana kedua hal tersebut memiliki jalinan fungsional bagi keberlangsungan hidup dan dinamika warganya". Kebudayaan masyarakat seiring waktu akan terjadi perubahan tergantung pada kekuatan kelompok masyarakat tersebut dalam memegang teguh kebudayaannya, hal ini termasuk dalam proses dinamika masyarakat. Kelompok masyarakat yang cenderung tetap memegang teguh budaya biasa disebut dengan kelompok masyarakat tradisional, dimana dinamika masyarakat terproteksi oleh adat istiadat.

Menurut Tejo ilmuwan di bidang sosial, bahwa "kehidupan manusia tidak statis tetapi dinamis, kondisi ini disebut dengan perubahan sosial". (Tejokusumo, 2014). Terdapat tiga aspek perubahan masyarakat, yaitu 1) Perubahan idea; 2) pengaruh unsur budaya material terhadap mental masyarakat; 3) perubahan ideologi. Namun, proses dinamika masyarakat akan semakin intensif dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang informasi dan komunikasi. Difusi inovasi tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Pengadopsian inovasi ini diharapkan tidak merugikan tatanan kehidupan masyarakat yang sudah mapan, tetapi memberikan makna bagi perbaikan kehidupan bermasyarakat.

Kelompok masyarakat adat atau tradisional memiliki kecenderungan untuk mempertahankan nilai, norma, dan kebiasaan yang sudah turun temurun sehingga masih banyak pemikiran beberapa kelompok budaya yang menolak sebuah perubahan. Kemajuan zaman yang melahirkan banyak teknologi terutama teknologi komunikasi yang sudah berubah semakin maju menjadi sebuah tantangan bagi kelompok masyarakat adat sebab penolakan terhadap perubahan sosial akan lebih terasa sulit. Namun, untuk menyeimbangi struktur kehidupan tetap diperlukannya suatu perubahan karena Perubahan sosial diartikan sebagai perubahan penting dalam struktur sosial, pola perilaku dan sistem interaksi sosial, termasuk perubahan nilai budaya, norma, dan fenomena. Perubahan akan selalu ada dalam perjalanan hidup masyarakat dan menjadi penggerak kehidupan mereka. Satu-satunya perbedaan adalah cepat atau lambat perubahan tersebut terjadi, bahkan satu orang atau sekelompok orang yang tinggal di daerah terpencil pun pasti akan mengalami dinamika kehidupan.

Kelompok masyarakat adat memiliki ciri dinamis dalam perubahannya yang bergantung pada tantangan internal dan kekuatan eksternal yang dihadapinya. Kampung adat Kasepuhan Cipta Gelar memiliki ciri dinamis sendiri dimana mereka menyeimbangkan perubahan sosial dengan tetap memegang teguh kebudayaan leluhurnya guna tetap dapat menyeimbangkan struktur kehidupan mereka. Pemberdayaan dan pengembangan salah satu upaya yang dilakukan oleh Kampung Adat Kasepuhan Cipta Gelar untuk menyeimbangkan struktur kehidupan tanpa menimbulkan suatu konflik sosial. mengikuti perubahan kemajuan teknologi dengan perbedayaan potensi dan inovasi masyarakat sehingga tetap mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dari meningkatkan kemampuan dan memanfaatkan ilmu dan teknologi.

Dinamika Masyarakat

Manusia sejatinya membutuhkan orang lain maka sebagian besar mereka memiliki rasa untuk hidup berkelompok karena menganggap bahwa keadaan lingkungan itu dinamis atau selalu berubah. Seperti dikatakan oleh para ilmuwan di bidang sosial yang menyetujui bahwa kehidupan manusia tidak statis karena sifatnya selalu berubah atau dinamis (Tejokusumo, 2014). Dinamika masyarakat adalah situasi dimana masyarakat mengalami suatu perubahan sosial. Perubahan sosial adalah situasi dimana terjadi adanya perubahan dalam lembaga kemasyarakatan di suatu masyarakat yang dapat mempengaruhi situasi sosialnya.

Lembaga masyarakat ini sebagai kelompok manusia dimana perubahan dapat mempengaruhi struktur masyarakat.

William F.Ogburn (2004), More (1978) keduanya mengatakan bahwa perubahan lingkungan dipengaruhi dari dua faktor yakni material dan immaterial. Serta perubahan sosial yang terjadi dalam lingkungan masyarakat sangat penting, dan perubahan itu terutama pada pola dan perilaku masyarakat yang dipengaruhi oleh lingkungannya.

Dinamika masyarakat tidak mengenal tempat dan waktu, oleh karena itu dinamika masyarakat bersifat universal. Salah satu faktornya adalah inovasi. Inovasi tumbuh dari upaya masyarakat dalam berpikir untuk mendapatkan kehidupan yang diinginkan. Proses dinamika masyarakat akan semakin intensif sesuai kemajuan pemikiran manusia untuk merubah kehidupannya sekarang dengan kehidupan yang diharapkan. Meskipun, sebagian masyarakat yang tidak ikut serta menjadi agen inovasi untuk berubah tetapi tidak menutup kemungkinan ikut terbawa arus untuk berubah pula. masyarakat dan budaya merupakan dua hubungan yang menjadi konsep dalam kelangsungan dinamika masyarakatnya (Nahak, 2019). Dinamika masyarakat merupakan hasil dari upaya dalam beradaptasi dengan kehidupan dan lingkungan yang berlangsung. Seperti, pengaruh kemajuan teknologi. teknologi dan ilmu pengetahuan yang semakin maju membantu proses dinamika masyarakat semakin intensif.

Faktor Dinamika Masyarakat

Dinamika masyarakat atau perubahan masyarakat tidak dapat dihindari dalam perjalanan kehidupan manusia sebagai proses perkembangan dan adaptasi kehidupannya, sekalipun kehidupan didaerah terpencil termasuk kampung adat pasti mengalami perubahan. Namun, hal yang membedakannya adalah waktu perubahan tersebut terjadi cepat atau lambat. Menurut Sorokin (1963) menyebutkan bahwa terdapat tiga aspek penting dari dinamika atau perubahan masyarakat, yaitu; (1). Perubahan idea (*ideatinal change*); (2) pengaruh unsur budaya material terhadap mental masyarakat (*sensational change*), dan (3) perubahan ideologi (*idealistic change*). Selain itu, dinamika masyarakat dapat terjadi karena adanya inovasi yang menjadi pendorong perubahan pada masyarakat. Dinamika atau perubahan masyarakat dapat terjadi karena adanya beberapa faktor tertentu (Tejokusumo, 2014), antara lain: Penyebaran informasi, hal ini meliputi pengaruh dan mekanisme media dalam menyampaikan pesan dan pemikiran; Modal, meliputi sumber

daya manusia ataupun modal finansial; Teknologi, suatu faktor yang cepat berubah cepat sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan; Ideologi atau agama, keyakinan agama atau ideologi tertentu berpengaruh terhadap proses perubahan sosial; Birokrasi, terutama berkaitan dengan berbagai kebijakan pemerintahan tertentu dalam membangun kekuasaannya; Agen, hal ini secara spesifik dimaksudkan terhadap inisiatif individual dalam mencari kehidupan yang lebih baik.

Masyarakat Tradisional

Masyarakat tradisional dalam hal dinamika cenderung lebih terproteksi oleh keyakinan adat istiadat. Seperti yang diketahui bahwa masyarakat tradisional memiliki adat istiadat yang turun temurun sejak struktur kehidupan dimulai. Menurut pemikiran masyarakat tradisional mengagungkan dan mempertahankan warisan adat istiadat, nilai, dan norma dari nenek moyang merupakan suatu kewajiban dan kebanggaan. Hal ini yang membuat masyarakat tradisional dinilai memiliki sikap tertutup terhadap perubahan karena merasa bahwa budayanya lebih baik dibandingkan yang lain. Masyarakat tradisional cenderung hidup berkelompok, mereka saling bergantung satu sama lain. Hal ini menjadi salah satu faktor kebudayaan mereka tetap terjaga. Menurut Sajogyo (1979), masyarakat tradisional adalah orang-orang atau suku bangsa yang sudah hidup sesuai dengan tradisi yang tidak terputus-putus.

Industri 4.0 dan Society 5.0

Industri 4.0 merupakan salah satu tahap revolusi keempat dalam perubahan kehidupan. Terdapat tiga tahapan menuju revolusi industri 4.0, yaitu; (1) Revolusi industri 1.0 yang terjadi pada abad ke-18 yang ditandai dengan penemuan mesin uap, sehingga memungkinkan barang diproduksi secara massal; (2) Revolusi industri 2.0 terjadi antara abad 19-20 melalui penggunaan listrik yang membuat biaya produksi menjadi murah; (3) revolusi industri 3.0 terjadi sekitar 1970-an melalui penggunaan komputerisasi; (4) dan revolusi industri 4.0 sendiri terjadi sekitar tahun 2010-an melalui rekayasa kecerdasan dan *internet of thing* sebagai tulang punggung pergerakan dan konektivitas manusia dan mesin (Mumtaha, 2019). Revolusi Industri 4.0 secara fundamental mengubah cara orang berpikir, hidup dan berhubungan satu sama lain (Ahmadi, 2019). Masa ini akan mengganggu berbagai aktivitas manusia tidak hanya di bidang teknologi tetapi juga di bidang lain seperti ekonomi, sosial dan politik (Prasetyo & Trisyanti Umi, 2018).

Perkembangan society 5.0 merupakan perubahan tingkah laku masyarakat yang mengikuti perkembangan teknologi dan berpusat pada kebutuhan manusia saat ini (Wibawa, 2019). Perkembangan society 5.0 sebenarnya dimulai sejak awal peradaban di dunia. Pada Society 1.0 ditandai dengan aktivitas berburu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam Society 3.0, komunitas mulai mengenal dan mendalami dunia industri yang diharapkan dapat memfasilitasi setiap aktivitas untuk memenuhi kebutuhan. Perkembangan Society 5.0 benar-benar telah dimulai sejak dimulainya peradaban dunia. Hal ini ditandai dengan adanya perilaku masyarakat yang terfokus pada kebutuhan masyarakat. Pada Society 1.0 ditandai dengan kegiatan berburu yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Masyarakat sosial 2.0 terbiasa bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Di masa Society 3.0, komunitas mulai mengenal dan menjelajahi dunia industri yang diharapkan dapat menciptakan kondisi yang mendukung semua aktivitas untuk memenuhi permintaan. Teknologi mulai diterapkan dan digunakan dalam memenuhi kebutuhan hidup dan mendapatkan informasi tentang Masyarakat 4.0.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang dilakukan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan dengan metode penelitian studi kasus. Sasaran Penelitian dalam penelitian ini adalah para masyarakat Desa Kasepuhan Ciptagelar dalam menerima dan mengikuti perkembangan teknologi modern. Informasi yang dikumpulkan dengan cara bertanya kepada masyarakat asli yang tinggal di Desa Kasepuhan Ciptagelar karena ingin mendapatkan sumber yang benar adanya dengan keadaan yang ada di Desa Kasepuhan Ciptagelar. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan beberapa cara yaitu: menurut Goldman (1962) bahwa Wawancara *In Depth Interview* yang dilakukan secara mendalam kepada masyarakat Desa Kasepuhan Ciptagelar. Studi Pustaka adalah pengumpulan data dan informasi dari beberapa jurnal, buku-buku dan media online yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian dilakukan secara online karena menyesuaikan dengan keadaan yang sedang dialami sekarang dan juga tidak dapat berkunjung langsung ke Desa Kasepuhan Ciptagelar karena Desa Kasepuhan Ciptagelar melarang adanya tamu yang berkunjung karena kondisi yang tidak memungkinkan oleh karena itu penelitian ini dan wawancaranya online pada tanggal 29 Desember 2020.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Kasepuhan Ciptagelar merupakan sebuah kampung adat yang berada di wilayah Kabupaten Sukabumi lebih tepatnya di Kampung Sukamulya Desa Sirnaresmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi. Desa Kasepuhan Ciptagelar ini memiliki ciri khas yang terletak pada lokasi dan bangunan rumahnya yang masih berpegang pada tradisi orang Sunda asli zaman dahulu. Kata yang di kenal sesepuh itu merupakan sebutan orang yang menempati desa Ciptagelar yang artinya leluhur yang masih memegang teguh tradisi leluhur. Didirikan oleh pasuka Kerajaan Sunda yang waktu itu meneuruti perintanya Prabu Siliwangi dan dibebaskan karena Prabu Siliwangi ingin moksa. Para prajurit kemudian dipisahkan menjadi tiga kelompok dan membentuk desa baru yang saling berhubungan. Salah satunya adalah Kampung Gede yang berfungsi sebagai pusat kasepuhan. Kampung Gede pernah berpindah-pindah beberapa kali untuk menghindari pengaruh imperialisme Jepang dan konflik politik DI/TII. Sistem agama yang ada di masyarakat Kasepuhan Ciptagelar merupakan masyarakat adat yang masih mempertahankan budaya leluhur yang menjadi tuntunan untuk berkehidupan. Menurut masyarakat Kasepuhan Ciptagelar memaknai bahwa nenek moyang merupakan orang yang dianggap memiliki kemampuan lebih dan melebihi kemampuan manusia pada umumnya yang dianggap sebagai keturunan dari kerajaan Padjajaran. Agama masyarakat Desa Kasepuhan Ciptagelar adalah Islam tetapi memiliki unsur animisme dan dinamisme yang kuat masih mempercayai roh /arwah dan benda-benda pusaka.

Dinamika masyarakat adalah situasi dimana masyarakat mengalami suatu perubahan sosial (Fajarini, 2014). Perubahan sosial adalah situasi dimana terjadi adanya perubahan dalam lembaga kemasyarakatan di suatu masyarakat yang dapat mempengaruhi situasi sosialnya. Dinamika masyarakat tidak mengenal tempat dan waktu, oleh karena itu dinamika masyarakat bersifat universal (Prasojo, 2013). Salah satu faktornya adalah inovasi. Inovasi tumbuh dari upaya masyarakat dalam berpikir untuk mendapatkan kehidupan yang diinginkan. Proses dinamika masyarakat akan semakin intensif sesuai kemajuan pemikiran manusia untuk merubah kehidupannya sekarang dengan kehidupan yang diharapkan. Meskipun, sebagian masyarakat yang tidak ikut serta menjadi agen inovasi untuk berubah tetapi tidak menutup kemungkinan ikut terbawa arus untuk berubah pula (Syarif, 2018). Masyarakat dan budaya merupakan dua hubungan yang menjadi konsep dalam kelangsungan dinamika masyarakatnya dan Masyarakat tradisional dalam hal dinamika

cenderung lebih terproteksi oleh keyakinan adat istiadat (Ningsih, 2016). Seperti yang diketahui bahwa masyarakat tradisional memiliki adat istiadat yang turun temurun sejak struktur kehidupan dimulai. Menurut pemikiran masyarakat tradisional mengagungkan dan mempertahankan warisan adat istiadat, nilai, dan norma dari nenek moyang merupakan suatu kewajiban dan kebanggaan. Hal ini yang membuat masyarakat tradisional dinilai memiliki sikap tertutup terhadap perubahan karena merasa bahwa budayanya lebih baik dibandingkan yang lain (Indrawardana, 2012). Tidak halnya dengan warga Desa Kasepuhan Ciptagelar yang merupakan kampung adat yang masih memegang teguh tradisi warisan dari leluhur meskipun kampung adat yang menerima dan mengikuti perkembangan teknologi modern seperti yang disebutkan oleh Bapak Yoyo Yogasmana selaku warga asli dari Desa Kasepuhan Ciptagelar menyatakan bahwa mengikuti dan menerima adanya teknologi modern bukan berarti menghilangkan tradisi yang sudah ada sejak dahulu kala dan yang sudah diwariskan oleh para leluhur.

Pada tahun 1988 almarhum Encup Sucipta yang dikenal Abah Anom pemimpin kasepuhan telah merintis pembangkit listrik tenaga air yang menggunakan kincir kayu di daerah kampung Ciptarasa untuk menerangi 55 rumah. Saat itu Abah Anom yang baru berusia 21 tahun ia yang menggantikan ayahnya Abah Arjo yang wafat pada tahun 1982 sebagai pemimpin adat yang sukses dengan pembangkit pertama dan selanjutnya tiga tahun kemudian Abah Anom mencoba membangun turbin yang lebih besar di daerah kampung Cicemet dan targetnya untuk menerangi 6.000 rumah warga kasepuhan dengan kapasitas 30.000 watt dan modal utamanya adalah debit air yang berlimpah di Desa Kasepuhan Ciptagelar ini memiliki sumber mata air yang berlimpah dan sungai di sana masih terjaga tetapi proyeknya itu hanya bertahan satu tahun saja dikarenakan rusak akibat bebannya yang terlalu besar, Abah Anom tidak menyerah dan tidak tinggal diam beliau memanfaatkan jejaring sosialnya di ibukota dan tahun 1996 Abah Anom ini mendapat dukungan dari kedutaan Jepang untuk memperbaikinya.

Di tahun 1997 awal mula pembangunan infrastruktur energi listrik di Kasepuhan Ciptagelar dan membangun jaringan tiang dan kabel listrik dan saat itu di rekam untuk dokumenter yang akhirnya ditayangkan di CIGA TV dan pada saat itu warga yang mengular sepanjang dua meter sambil membawa batu, semen, tiang besi, gulungan kabel dan peralatan lainnya dan juga diiringi oleh para seniman Kasepuhan Ciptagelar yang terus bernyanyi sembari diiringi oleh angklung sepanjang jalan untuk

membangun semangat ribuan warga yang sedang bergotong royong dan kegiatan ini pernah dilakukan oleh Daud Beureuh di Aceh pada tahun 1963 untuk membangun saluran irigasi Paya Raof di Padie yang melibatkan 2.000 warga secara mandiri tanpa dana dari negara. Energi listrik penting dikembangkan dari alam, karena untuk dimanfaatkan oleh manusia (Dzulfikar, 2018). Perkembangan teknologi modern ini dilihat dari pemakaian dan bahkan membuat sendiri seperti listrik. Desa Kasepuhan Ciptagelar membuat pembangkit listrik sendiri menggunakan turbin yang menghasilkan listrik dan di Desa Kasepuhan Ciptagelar ini lebih memilih menggunakan mikro hidro nama lain pemakaian listrik di Desa Kasepuhan Ciptagelar daripada menggunakan listrik dari PLN karena hitungan biaya yang dikeluarkan lebih murah dibanding menggunakan listrik dari PLN, saat pembuatan pembangkit listrik ini dilakukan secara gotong royong karena di Desa Kasepuhan Ciptagelar ini sering melakukan berbagai kegiatan dengan bergotong royong nilai gotong royong sudah melekat pada warga Desa Kasepuhan Ciptagelar.

Mikro Hydro yang di rencanakan pada tahun 2015 merupakan proyek dari Mikro Hydro for Indonesia yang membuktikan adanya kontribusi nyata dari generasi muda terhadap masyarakat. Mikro Hydro for Indonesia ini didukung oleh Yayasan Adaro Bangun Negeri yang berada di bawah naungan Adaro Group dan diketuai oleh Gamma Abdurrahman Thohir yang merupakan perintis dari proyek Mikro Hydro for Indonesia. Beliau mengatakan bahwa tujuan dari proyek ini adalah untuk meningkatkan akses listrik di pedesaan dan mengurangi kesenjangan listrik antara di luar pedesaan dengan pedesaan. Mikro Hydro for Indonesia ini mengaliri listrik sedikitnya 75 rumah yang dihuni 338 masyarakat yang hidup di Desa Kasepuhan Ciptagelar. Proyek ini merupakan awal mula untuk memulai mengikuti teknologi modern lainnya.

Tepat di 10 tahun sejak proyek ini di gagas oleh Anah Anom Desa Kasepuhan Ciptagelar sanggup memasok listrik hingga 60.000 watt dan selanjutnya proyek ini berjalan dari kampung ke kampung dalam skala kecil mencapai 10 turbin meskipun tidak semua warga kasepuhan teraliri listrik tetapi dilanjutkan oleh anaknya Abah Ugi dan pada saat itu berusia 22 tahun dan sedang berkuliah di Bandung karena mendapat tugas adat untuk menggantikan almarhum ayahnya pada tahun 2007, Abah Ugi yang sedang berkuliah langsung pulang kampung dan meninggalkan kuliahnya, Abah Ugi juga yang berhobi bermain band yang mendirikan kelompok musik di Kasepuhan Ciptagelar dan lanjut Abah Ugi untuk

melanjutkan proyek energi mandiri di Ciptagelar setelah setahun telah memimpin Abah Ugi ini yang mendirikan radio dan televisi komunitas yang hanya bermodal listrik yang dirintis oleh sang ayah dan juga merupakan ilmu yang didapat saat kuliah di Bandung dan lahirlah CIGA TV.

Keunikan dari Desa Kasepuhan Ciptagelar ini adalah mereka memiliki stasiun televisi sendiri yang diberi nama CIGA TV, dan CIGA TV merupakan siaran televisi komunitas yang dimiliki masyarakat adat Kasepuhan Ciptagelar dan awal siaran pada tahun 2008 isi dari programnya ada aktivitas pertanian, upacara adat dan program hiburan lainnya dan sesekali CIGA TV menayangkan musik, sinetron, film dokumenter dan bahkan ada film Hollywood yang ditugaskan oleh Abah Ugi untuk mengelola televisi adalah Yoyo Yogasmana. Tayangan dokumentasi pemetaan wilayah yang dilakukan oleh warga-warga dengan mendatangi daerah terpencil bertujuan untuk menentukan batas wilayah dan koordinat kasepuhan yang termasuk ke dalam wilayahnya Taman Nasional Gunung Halimun (TNGH). Yoyo Yogasmana yang merupakan seniman pertunjukkan kelas dunia yang sejak 2007 memutuskan menetap di Ciptagelar yang tidak hanya sendiri untuk mengurus CIGA TV tetapi dibantu oleh kru yang rata-ratanya adalah usia remaja belasan tahun tetapi tidak menjadi hambatan untuk menayangkan tontonan untuk CIGA TV meskipun agak kewanalan dalam menyunting video dikarenakan materi yang banyak sementara tayangannya ditunggu-tunggu oleh warga Desa Kasepuhan Ciptagelar. Tayangan CIGA TV menjadi program favoritnya para warga Desa Kasepuhan Ciptagelar dan hambatan terbesar yang dialami adalah CIGA TV tidak dapat menjangkau untuk wilayah yang jauh karena pemancar televisi tidak secanggih pemancar televisi milik negara jadi wilayah yang terpencil di ketinggian 1.100 meter di atas permukaan laut yang tidak dapat terjangkau dan juga permasalahan listrik yang belum merata.

Pada tahun 2011 Abah Ugi yang hobi dalam elektronika dan mekanik ini juga membuat turbin sendiri dengan kapasitas 9.750 watt untuk ke kampung Sukamulya. Adapun generator, panel instalasi, saluran air sepanjang 430 meter, dan pipa sepanjang 87 meter, dibantu sebuah perusahaan otomotif yang melakukan kegiatan sosial di Ciptagelar yang memanfaatkan dari sungai Cibarengkok yang mampu menyediakan 200 liter per detik untuk menggerakkan turbin dan generator dan lanjut energinya dialiri ke rumah – rumah warga. dan hasilnya dari tahun 2011 kasepuhan Ciptagelar punya tambahan pasokan 5.000 watt di musim

kemarau, dan 8.000 watt di musim penghujan untuk warga di kampung Sukamulya. Daya listrik sebesar itu cukup untuk menerangi 66 rumah yang rata-rata memiliki tiga lampu jenis LED dan satu pesawat televisi. Warga menyatakan bahwa biaya iuran untuk listrik di Desa Kasepuhan lebih murah dibandingkan ke PLN dan dengan hadirnya listrik di Desa Kasepuhan Ciptagelar dapat mengikuti perkembangan teknologi modern dan juga dapat termotivasi untuk menjaga hutan yang memasok air karena air sungai merupakan sumber listrik dari Desa Kasepuhan Ciptagelar.

Menerima adanya perkembangan teknologi modern di kampung adat tidak menghasikan dampak negatif dilihat dari Desa Ciptagelar yang tidak meninggalkan adat istiadat meskipun mereka menerima dan mengikuti perkembangan teknologi modern asalkan bijak dalam penggunaan dan tidak terbawa oleh dunia luar pemanfaatan teknologi modern dapat digunakan dengan baik agar mempermudah kehidupan di Desa Kasepuhan Ciptagelar dan menyamaratakan kehidupan di kota maupun di desa agar meminimalisir ketertinggalan dan semua ini merupakan upaya dari pemimpin Desa Kasepuhan Ciptagelar untuk mensejahterakan warganya.

KESIMPULAN

Melestarikan kebudayaan yang sudah diwariskan oleh leluhur merupakan suatu kebanggaan bagi masyarakat kampung adat Kasepuhan Ciptagelar. Kebiasaan, nilai dan norma untuk tetap dijaga merupakan suatu keharusannya bagi masyarakat tradisional. Memproteksi diri dari pengaruh budaya lain pun sudah menjadi kewajiban bagi masyarakat tradisional demi menghindari lunturnya kebudayaan asli nenek moyang. Namun, Kampung Adat Kasepuhan Ciptagelar memiliki budaya yang berprinsip bahwa menyeimbangkan kehidupan merupakan sebuah kepentingan pula. Dalam menyeimbangi pola kehidupan, masyarakat kampung adat kasepuhan ciptagelar mengalami sebuah proses dinamika, yakni mereka ikut menggunakan alat komunikasi modern seperti televisi, telepon pintar, komputer, dan internet. Penggunaan teknologi modern tersebut dibuat dengan tetap menjalankan nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong. Mereka menyediakan teknologi dengan membuatnya sendiri seperti saluran televisi sendiri, jaringan internet sendiri. Meskipun mereka mengalami perubahan sosial tetapi mereka tidak menghilangkan adat dan istiadat leluhur mereka. Dinamika yang terjadi di kampung adat

Kasepuhan Ciptagelar ini guna mencapai kehidupan yang seimbang dan menghindari ketertinggalan meski tetap memegang teguh budaya leluhur.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, F., & Ibda, H. (2019). *Konsep dan aplikasi literasi baru di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0*. CV. Pilar Nusantara.
- Ciptagelar, Kampung Adat di Sukabumi yang Teguh Memegang Tradisi. Kumparan Diakses tanggal 2020-08-31 dari <https://kumparan.com/kumparantravel/ciptagelarkampung-adat-di-sukabumi-yang-teguh-memegang-tradisi1536568917455604881/full>
- Dove, M. R. (1985). The agroecological mythology of the Javanese and the political economy of Indonesia. *Indonesia*, (39), 1-36.
- Dzulfikar, D., & Broto, W. (2016, October). Optimalisasi pemanfaatan energi listrik tenaga surya skala rumah tangga. In *Prosiding Seminar Nasional Fisika (E-Journal)* (Vol. 5, pp. SNF2016-ERE).
- Fajarini, U. (2014) "Peranan kearifan lokal dalam pendidikan karakter." *SOSIO-DIDAKTIKA: Social Science Education Journal* 1.2: 123-130.
- Goldman, A. E. (1962). The group depth interview. *Journal of marketing*, 26(3), 61-68.
- Hatu, R. (2011). Perubahan sosial kultural masyarakat pedesaan (Suatu tinjauan teoritik-empirik). *Jurnal Inovasi*, 8(04).
- Hindaryatiningsih, N. H. (2016). Model proses pewarisan nilai-nilai budaya lokal dalam tradisi masyarakat buton. *Sosiohumaniora*, 18(2), 100-107.
- Indrawardana, I. (2012). Kearifan lokal adat masyarakat Sunda dalam hubungan dengan lingkungan alam. *Komunitas: International Journal of Indonesian Society And Culture*, 4(1).
- Lupien, S. J., Gillin, C. J., & Hauger, R. L. (1999). Working memory is more sensitive than declarative memory to the acute effects of corticosteroids: A dose-response study in humans. *Behavioral neuroscience*, 113(3), 420.
- Prasetyo, B., & Trisyanti, U. (2018). Revolusi Industri 4.0 dan Tantangan Perubahan Sosial. *IPTEK Journal of Proceedings Series*, (5), 22-27.

- Moré, J. J. (1978). The Levenberg-Marquardt algorithm: implementation and theory. In *Numerical analysis* (pp. 105-116). Springer, Berlin, Heidelberg.
- Mumtaha, H. A., & Khoiri, H. A. (2019). Analisis Dampak Perkembangan Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 Pada Perilaku Masyarakat Ekonomi (E-Commerce). *Jurnal Pilar Teknologi: Jurnal Ilmiah Ilmu Ilmu Teknik*, 4(2).
- Nahak, H. M. (2019). Upaya melestarikan budaya indonesia di era globalisasi. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 5(1), 65-76.
- Ningrum, E. (2012). Dinamika Masyarakat Tradisional Kampung Naga di Kabupaten Tasikmalaya. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 28(1), 47-54.
- Prasetyo, B., & Trisyanti, U. (2018). Revolusi industri 4.0 dan tantangan perubahan sosial. *IPTEK Journal of Proceedings Series*, (5), 22-27.
- Prasojo, Z. H. (2013). Dinamika masyarakat lokal di perbatasan. *Walisono: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 21(2), 417-436.
- Putra, M. (2018). Hukum Dan Perubahan Sosial (Tinjauan Terhadap Modernisasi Dari Aspek Kemajuan Teknologi). *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 47-59.
- Sajogyo, P., Hastuti, E. L., Surkati, S., Wigna, W., & Suryanata, K. (1979). Studying rural women in West Java. *Studies in family planning*, 10(11/12), 364-370.
- Sorokin, P. A. (1963). *A long journey: The autobiography of Pitirim A. Sorokin*. Rowman & Littlefield.
- Syaiful, F. L., Dinata, U. G. S., & Ferido, F. (2018). Pemberdayaan masyarakat Nagari Sontang Kabupaten Pasaman melalui inovasi budidaya sapi potong dan inovasi pakan alternatif yang ramah lingkungan. *Buletin Ilmiah Nagari Membangun*, 1(3), 21-31.
- Tejokusumo, B. (2014). Dinamika masyarakat sebagai sumber belajar ilmu pengetahuan sosial. *Geo Edukasi*, 3(1).
- Volti, R. (2004). William F. Ogburn" Social Change with Respect to Culture and Original Nature".

Wibawa, R. P., & Agustina, D. R. (2019). Peran pendidikan berbasis higher order thinking skills (hots) pada tingkat sekolah menengah pertama di era society 5.0 sebagai penentu kemajuan bangsa indonesia. *EQUILIBRIUM: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya*, 7(2), 137-141.



PENINGKATAN KEMAMPUAN *PUBLIC SPEAKING* SEBAGAI UPAYA UNTUK MENJADI WARGA NEGARA GLOBAL BAGI GENERASI MUDA

Asep Rudi Casmana^{1*}, Dwi Afrimetty Timoera², Iqbal Syafruddin³,
Adistyana Pitaloka Kusmawati⁴, Muhammad Ageza Pratama⁵, Aldi
Wahyu Pradana⁶

^{1, 2, 3, 4, 5, 6}Universitas Negeri Jakarta, Jakarta Timur, Indonesia

* aseprudi@unj.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk dapat meningkatkan kemampuan public speaking sebagai salah satu upaya untuk dapat menjadi warga negara global melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kemampuan *public speaking* memiliki peluang yang sangat besar untuk menjadi sebuah profesi terkhusus pada generasi muda untuk menjadi warga negara global. Generasi muda yang terhimpun dalam Paguyuban Mojang Jajaka Kabupaten Subang berada dalam naungan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Subang memiliki tugas untuk menjadi seorang *public speaker*. Metode penelitian yang dilakukan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Untuk dapat memperoleh data, 15 orang dilakukan wawancara setelah mereka mengikuti pelatihan public speaking dalam pengabdian kepada masyarakat mengenai manfaat kegiatan tersebut dan kaitannya dengan warga negara global. Hasil data dari responden dianalisis dan dilakukan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pelatihan public speaking dapat membuat para pemuda menjadi warga negara global, hal ini dikarenakan mereka menjadi lebih percaya diri dalam mengembangkan kemampuan untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain yang belum dikenal sebelumnya. Hasil penelitian ini berimplikasi bahwa warga negara global perlu untuk dapat memiliki kemampuan public speaking agar mereka dapat berkomunikasi dengan seseorang yang berbeda dengan etnis dan kelompoknya.

Kata Kunci: Public Speaking, Generasi Muda, Warga Negara Global, Public Speaker, Percaya Diri

ABSTRACT

This study aims to improve public speaking skills as an effort to become a global citizen. The ability of public speaking has a very big opportunity to become a profession, especially for the younger generation to become global citizens. The younger generation gathered in the Mojang Jajaka Association of Subang Regency under the auspices of the



Subang Regency Tourism, Youth and Sports Office has the task of becoming a public speaker. The research method used is qualitative with a descriptive approach. To be able to obtain data, 15 people were interviewed after they attended public speaking training about the benefits of this activity and its relation to global citizens. The results of the data from the respondents were analyzed and triangulated. The results of the study show that public speaking training activities can make young people become global citizens, this is because they become more confident in developing the ability to communicate with other people who have not been known before. The results of this study imply that global citizens need to be able to have public speaking skills so that they can communicate with someone who is different from their ethnicity and group.

Keywords: *Public Speaking, Young Generation, Global Citizen, Public Speaker, Confident*

PENDAHULUAN

Public speaking merupakan kemampuan dasar atau skill yang sangat dibutuhkan pada abad ke 21 (Hulseberg & Twait, 2016). *Public speaking* dibutuhkan untuk menunjang seseorang untuk dapat terus berkarya, melakukan inovasi dan menyampaikan hasil temuan di muka umum. Kemampuan berbicara di depan umum juga dapat menjadi sebuah profesi bagi setiap orang, sehingga menjadi penting bagi mereka yang memiliki keterlibatan untuk menyampaikan informasi pada khalayak contohnya seperti tenaga pendidik dan orang-orang yang terlibat dalam hubungan masyarakat (Vallade, Kaufmann, Frisby, & Martin, 2020; Vallée & Ruglis, 2017). Pada dasarnya setiap orang memiliki ilmu untuk ditransfer kepada orang lain. Oleh karena itu, kemampuan berbicara di depan umum menjadi salah satu hal yang sangat perlu untuk dapat dipelajari (Andolina & Conklin, 2018; King, 2016).

Public speaking dapat menjadi sebuah profesi baik sebagai pekerjaan utama atau pekerjaan sampingan (Rayner, Papakonstantinou, & Gleadow, 2016; Viartasiwi, 2018). seperti *news anchor*, *master of ceremony*, kegiatan keprotokoleraan dan pembawa acara lainnya dan tentu saja profesi tersebut akan mendapatkan honor yang akan mereka terima (Ataeifar, Sadighi, Bagheri, & Behjat, 2019; Faas, Darmody, & Foley, 2019; King & Finn, 2017). Hal tersebut menjadi sebuah benefit atau manfaat bagi mereka yang memiliki kemampuan *public speaking*. Melihat banyaknya peluang untuk menjadi seorang memiliki kemampuan berbicara di depan umum, maka hal ini menjadi ketertarikan bagi generasi muda baik yang masih mengenyam pendidikan maupun yang telah lulus untuk dapat mempelajari, mengkaji dan mempraktikkan bagaimana proses untuk dapat menguasai teknik berbicara di depan umum.

Generasi muda merupakan kaum yang memiliki rentang usia 20-40 tahun yang sangat membutuhkan kemampuan berbicara di depan umum (Hansen, 2016; Keith, 2016). Untuk dapat mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuannya generasi muda ini perlu sebuah ruang untuk dapat mengeksplorasi hal-hal yang dapat memberikan dampak yang lebih baik. Ruang tersebut salah satunya adalah Paguyuban Mojang Jajaka Kabupaten Subang. Paguyuban ini berada dalam naungan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Subang. Paguyuban ini bertujuan untuk dapat memberikan efek positif sebagai *public figure* yang memberikan edukasi kepada para generasi muda lainnya. Hal ini sesuai dengan fungsi sebuah organisasi kemasyarakatan yang mana organisasi kepemudaan kemasyarakatan bertujuan untuk dapat

memberikan kampanye positif mengedukasi kepada masyarakat (Lindner et al., 2021; Ward, 2016).

Dalam proses regenerasi anggota Paguyuban Mojang Jajaka Kabupaten Subang, organisasi ini melakukan pergantian kepengurusan setiap tahunnya sehingga orang yang telah selesai masa jabatannya akan digantikan oleh pengurus baru. Namun pada saat setelah pergantian tersebut, pengurus baru masih belum memiliki pengalaman dan pengetahuan mengenai teknik berbicara di depan umum. Sehingga dibutuhkan pelatihan *public speaking* untuk dapat menjadi solusi dan menuntaskan permasalahan tersebut. Oleh karena itu, pengabdian kepada masyarakat ini menjadi sangat penting untuk dilaksanakan. Adapun yang menjadi fokus dalam pelatihan ini adalah Mojang Jajaka Kabupaten Subang sebagai pembawa acara, keprotokoleran, pemandu wisata dengan tujuan Mojang Jajaka mendapat pengalaman dan pengetahuan mengenai teknik berbicara di depan umum dan diharapkan pengurus Mojang Jajaka baru dapat memiliki rasa percaya diri untuk dapat menopang tugas seorang Mojang Jajaka Kabupaten Subang.

METODE PENELITIAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan melakukan pendekatan, praktik, dan pendampingan. Pendekatan yang dilakukan pada awal kegiatan adalah menyampaikan beberapa teknik mengenai berbicara di depan umum, lalu setiap Mojang Jajaka akan mempraktikkan teknik yang telah disampaikan, selanjutnya Mojang Jajaka diberikan pendampingan dengan memperhatikan kekurangan dari penampilan setiap Mojang Jajaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini didasarkan pada observasi awal yang menunjukkan bahwa proses regenerasi kepengurusan Mojang Jajaka mengalami penurunan kualitas yang ditandai dengan kemampuan *public speaking* setiap pengurus tidak setara dengan kepengurusan sebelumnya. Kondisi tersebut mendorong adanya pelatihan mengenai *public speaking* dengan upaya meningkatkan kembali kualitas Mojang Jajaka untuk dapat lebih percaya diri dalam menjalankan tugasnya selama satu tahun sebagai citra industri pariwisata Kabupaten Subang. Hal ini bertujuan untuk dapat menjadikan para pemuda yang tergabung dalam sebuah paguyuban tersebut untuk dapat menjadi warga

negara global, yang mana salah satu karakter dari warga negara global adalah mampu untuk dapat berkomunikasi dengan Bahasa asing dan berbicara di depan umum (Bailey, 2019). Menurut Bailey (2019) ketika seseorang sudah mampu untuk dapat berkomunikasi secara luas dan dapat menyampaikan pendapatnya, maka seseorang tersebut mampu untuk dapat menjadi warga negara global.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara tatap muka sehingga materi yang disampaikan dapat tersampaikan secara optimal. Adapun pelaksanaan program pengabdian ini dilakukan sebagai berikut:

1. Pendekatan

Pendekatan dilakukan diawal dengan pembagian Mojang Jajaka dalam beberapa kelompok, kemudian pembicara menyampaikan materi seputar teknik dalam berbicara di depan umum. Adapun materi yang disampaikan mengenai alasan untuk menguasai kemampuan berbicara di depan umum dan tips untuk tetap percaya diri saat berbicara di depan umum seperti mengenal audiens yang akan hadir dalam kegiatan, memperhatikan penggunaan bahasa, memperhatikan intonasi suara dan menguasai materi yang akan disampaikan. Setelah materi disampaikan, Mojang Jajaka diberi kesempatan menyampaikan pertanyaan seputar *public speaking*.



Gambar 1. 1 Pembicara sedang menyampaikan materi



Gambar 1. 2 Mojang sedang menyampaikan pertanyaan

Dalam tahap pendekatan khususnya sesi tanya jawab, dilakukan observasi untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan berbicara di depan umum Mojang Jajaka saat menyampaikan pertanyaan. Ditemukan bahwa kemampuan berbicara di depan umum Mojang Jajaka masih terlihat gugup dan cenderung kurang percaya diri saat menyampaikan pertanyaan kepada pembicara, begitu pula saat Mojang

dan Jajaka saling menanggapi. Dalam sesi tanya jawab, para peserta kegiatan pelatihan tersebut sangat senang dan semangat ketika berkomunikasi dan berbicara di depan umum, seperti yang disampaikan oleh salah satu dari peserta kegiatan:

“Saya merasa lebih percaya diri ketika berkomunikasi dan menyampaikan pendapat di depan umum setelah mengikuti pelatihan ini, karena ini dapat menjadi bekal saya agar menjadi warga negara global”

Berdasarkan keterangan dari salah satu peserta pelatihan, kegiatan public speaking mampu untuk dapat menjadikannya lebih percaya diri dalam berkomunikasi, sehingga mereka merasa lebih siap ketika berkomunikasi dan berdiskusi dengan warga lainnya yang berbeda negara. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu indikator dari warga negara global yang mana seseorang memiliki kemampuan untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain diluar komunitasnya. Hansen (2016) mengatakan bahwa kemampuan warga negara global merupakan seseorang yang memiliki kemampuan untuk dapat memiliki *political literacy* atau memiliki pemahaman politik yang tinggi. Salah satu cara untuk dapat memperoleh pemahaman tersebut adalah dengan berdiskusi dan berkomunikasi dengan orang lain. Sehingga, pelatihan public speaking menjadi salah satu sarana untuk dapat berkomunikasi dan mempererat silaturahmi dengan kelompok.

2. Praktik

Setelah mendengarkan dan melakukan sesi tanya jawab, Mojang Jajaka diberikan kesempatan untuk mempraktikkan teknik berbicara di depan umum yang telah disampaikan diawal kegiatan. Adapun tantangan yang diberikan adalah mempromosikan setiap keunggulan daerah Kabupaten Subang khususnya sektor pariwisata. Baik Mojang maupun Jajaka sangat antusias terhadap kesempatan ini karena hal tersebut menjadi sebuah ajang latihan sebelum kemudian terjun langsung mempromosikan keunggulan daerah Kabupaten Subang khususnya sektor pariwisata.



Gambar 1. 3 Jajaka Sedang Mempromosikan Pariwisata Kabupaten Subang

Gambar 1.3 menunjukkan salah satu aktivitas ketika seseorang berusaha untuk dapat memberikan ide dan gagasannya di depan umum. Hal ini bertujuan untuk dapat membangun kepercayaan dan aktivitas masyarakat ketika mereka berkomunikasi. Salah satu peran dari warga negara global adalah mereka yang mampu untuk dapat berdiskusi, menyampaikan gagasan, serta dapat menyampaikan idenya di depan umum. Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, para peserta didorong untuk dapat berdiskusi dan berkomunikasi agar dapat menyampaikan ide dan gagasannya di depan umum. Broeckelman-Post (2019) mengatakan bahwa kepercayaan diri seseorang menjadi salah satu indikator utama dari seorang warga negara global. Mereka perlu untuk dapat memiliki kemampuan untuk dapat menyampaikan gagasannya, dan hal itu tidak dapat muncul dengan sendirinya, namun perlu untuk dapat dilatih dan dikembangkan melalui kegiatan pelatihan-pelatihan.

“Pada awalnya saya merasa kurang percaya diri dan malu ketika pembicara mendorong saya maju kedepan, karena saya belum memiliki pengalaman. Namun pembicara memberikan motivasi dan dukungan kepada saya, sehingga pada akhirnya saya mampu untuk dapat mengembangkan kemampuan saya”

Menurut keterangan dari salah satu peserta kegiatan, kegiatan pelatihan public speaking dapat menjadikan salah satu upaya dan sarana bagi mereka agar dapat memperoleh rasa percaya diri. Kemampuan percaya diri merupakan salah satu hal yang perlu dimiliki oleh public speaker dan warga negara global, karena ini dapat menjadi modal mereka agar dapat berkomunikasi dengan orang lain Boromisza- (Habashi, & Reinig, 2018). Berdasarkan hasil dari salah satu peserta kegiatan, kegiatan public speaking mampu untuk dapat membuat

mereka percaya diri dalam mengembangkan kemampuannya, sehingga hal ini perlu untuk terus didorong.

3. Pendampingan

Setelah melakukan praktik mempromosikan keunggulan daerah Kabupaten Subang khususnya sektor pariwisata, maka selanjutnya pembicara memberikan masukan-masukan terhadap kekurangan yang dilakukan oleh setiap Mojang Jajaka. Kekurangannya seperti kurangnya intonasi saat mempromosikan daerah wisata Kabupaten Subang. Selain itu, beberapa peserta juga kurang menguasai daerah spot wisata Kabupaten Subang sehingga masih perlu ditingkatkan pengetahuan Mojang Jajaka mengenai daerah pariwisata yang terdapat di Kabupaten Subang. Setelah sesi pendampingan ini, terlihat perbedaan Mojang Jajaka saat sesi pendekatan yang masih kurang percaya diri dengan sesi pendampingan yang memberikan efek positif bagi kepercayaan diri Mojang Jajaka dalam menyampaikan informasi. Pendampingan atau *Feedback* merupakan salah satu yang sangat dibutuhkan oleh peserta ketika mendapatkan kegiatan *publis speaking*. Menurut Hayward (2017), umpan balik atau *feedback* menjadi salah satu cara agar mereka mengetahui hal apa saja yang perlu untuk dapat diperbaiki dan meningkatkan kemampuan mereka dalam menjadikan sebagai seseorang yang menjadi warga negara global. Oleh sebab itu, pada setiap kegiatan atau pelatihan, perlu diberikan kemampuan atau timbal balik untuk dapat menjadikan mereka lebih percaya diri.

KESIMPULAN

Kegiatan *public speaking* mampu untuk dapat menjadikan seseorang agar menjadi warga negara global. Hal ini dikarenakan warga negara global perlu untuk dapat memiliki salah satu kemampuan berkomunikasi dengan orang lain. Skill warga negara global dapat dibentuk melalui berbagai cara, salah satunya adalah dengan pelatihan. Para peserta diberikan pelatihan, melakukan praktik secara langsung dan diberikan umpan balik dalam proses pelaksanaannya. Manfaat dari kegiatan pelatihan ini adalah para peserta mampu untuk dapat berkomunikasi secara global, baik di depan umum maupun dalam forum internasional yang mana dia tidak memiliki kenalannya.

Kegiatan pelatihan ini memberikan beberapa manfaat kepada para peserta diantaranya adalah mampu menjadikan mereka menjadi warga

negara global, karena dengan memiliki kemampuan public speaking, mereka dapat berkomunikasi secara langsung. Kedua menjadikan peserta memiliki rasa percaya diri dalam berkomunikasi dengan seseorang yang berbeda etnisnya, sehingga hal ini dapat memperkuat mereka dalam berteman. Ketiga kegiatan ini dapat membuat seseorang untuk memperoleh banyak teman dan jejaring dari mancanegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Andolina, M. W., & Conklin, H. G. (2018). Speaking With Confidence and Listening With Empathy: The Impact of Project Soapbox on High School Students. *Theory and Research in Social Education*, 46(3), 374–409. <https://doi.org/10.1080/00933104.2018.1435324>
- Ataeifar, F., Sadighi, F., Bagheri, M. S., & Behjat, F. (2019). Iranian female students' perceptions of the impact of mobile-assisted instruction on their english speaking skill. *Cogent Education*, 6(1), 1–19. <https://doi.org/10.1080/2331186X.2019.1662594>
- Bailey, E. (2019). A Historical View of the Pedagogy of Public Speaking. *Voice and Speech Review*, 13(1), 31–42. <https://doi.org/10.1080/23268263.2018.1537218>
- Bolívar-Cruz, A., Verano-Tacoronte, D., & Galván-Sánchez, I. (2018). Do self-efficacy, incentives and confidence in public speaking influence how students self-assess? *Cultura y Educacion*, 30(3), 528–555. <https://doi.org/10.1080/11356405.2018.1488420>
- Boromisza-Habashi, D., Hughes, J. M. F., & Malkowski, J. A. (2016). Public speaking as cultural ideal: Internationalizing the public speaking curriculum. *Journal of International and Intercultural Communication*, 9(1), 20–34. <https://doi.org/10.1080/17513057.2016.1120847>
- Boromisza-Habashi, D., & Reinig, L. (2018). Speech genres and cultural value in the Anglo-American public speaking course as a site of language socialization. *Journal of International and Intercultural Communication*, 11(2), 117–135. <https://doi.org/10.1080/17513057.2018.1428765>
- Bowes, L., Aryani, F., Ohan, F., Haryanti, R. H., Winarna, S., Arsianto, Y., ... Minnick, E. (2019). The development and pilot testing of an adolescent bullying intervention in Indonesia—the ROOTS Indonesia program. *Global Health Action*, 12(1). <https://doi.org/10.1080/16549716.2019.1656905>

- Broeckelman-Post, M. A. (2019). Context matters: Multilingual learners on public speaking courses. *Communication Teacher*, 33(1), 63–79. <https://doi.org/10.1080/17404622.2017.1372616>
- Broeckelman-Post, M. A., Hawkins, K. E. H., Murphy, J., Otusanya, A., & Kueppers, G. (2020). The impact of gender and introductory communication course type on public speaking performance. *Communication Teacher*, 34(1), 53–67. <https://doi.org/10.1080/17404622.2019.1593478>
- Butler, N. D. (2017). Learning to speak in the digital age: an examination of instructional conditions for teaching public speaking online. *Voice and Speech Review*, 11(1), 40–54. <https://doi.org/10.1080/23268263.2017.1370805>
- Calzo, J. P., Katz-Wise, S. L., Charlton, B. M., Gordon, A. R., & Krieger, N. (2019). Addressing the dearth of critical gender analysis in public health and medical pedagogy: an interdisciplinary seminar to generate student-created teaching examples. *Critical Public Health*, 29(1), 18–26. <https://doi.org/10.1080/09581596.2017.1419166>
- Casteleyn, J. (2019). Playing with improv(isational) theatre to battle public speaking stress. *Research in Drama Education*, 24(2), 147–154. <https://doi.org/10.1080/13569783.2018.1552129>
- Faas, D., Darmody, M., & Foley, H. (2019). Post-school transitions in Ireland: a case study of Russian-speaking students. *Comparative Education*, 55(3), 326–346. <https://doi.org/10.1080/03050068.2019.1619329>
- Hansen, J. B. (2016). Practices of response in public speaking the transformation of revision techniques into oral feedback. *Review of Communication*, 16(2–3), 213–221. <https://doi.org/10.1080/15358593.2016.1187450>
- Hayward, P. A. (2017). Incorporating TED Talk assignments into a public-speaking course. *Communication Teacher*, 31(4), 239–244. <https://doi.org/10.1080/17404622.2017.1358386>
- Hulseberg, A., & Twait, M. (2016). Sophomores speaking: An exploratory study of student research practices. *College and Undergraduate Libraries*, 23(2), 130–150. <https://doi.org/10.1080/10691316.2014.981907>
- Keith, W. (2016). Understanding the ecology of the public speaking course. *Review of Communication*, 16(2–3), 114–124.

<https://doi.org/10.1080/15358593.2016.1187451>

- King, P. E. (2016). When do students benefit from performance feedback? A test of feedback intervention theory in speaking improvement. *Communication Quarterly*, 64(1), 1–15. <https://doi.org/10.1080/01463373.2015.1078827>
- King, P. E., & Finn, A. N. (2017). A test of attention control theory in public speaking: cognitive load influences the relationship between state anxiety and verbal production. *Communication Education*, 66(2), 168–182. <https://doi.org/10.1080/03634523.2016.1272128>
- Lindner, P., Dagöö, J., Hamilton, W., Miloff, A., Andersson, G., Schill, A., & Carlbring, P. (2021). Virtual Reality exposure therapy for public speaking anxiety in routine care: a single-subject effectiveness trial. *Cognitive Behaviour Therapy*, 50(1), 67–87. <https://doi.org/10.1080/16506073.2020.1795240>
- Moschella, M., Pinto, L., & Martocchia Diodati, N. (2020). Let's speak more? How the ECB responds to public contestation. *Journal of European Public Policy*, 27(3), 400–418. <https://doi.org/10.1080/13501763.2020.1712457>
- Putra, G. N. E., & Dendup, T. (2020). Health and behavioural outcomes of bullying victimisation among Indonesian adolescent students: findings from the 2015 Global School-based Student Health Survey. *Psychology, Health and Medicine*, 00(00), 1–15. <https://doi.org/10.1080/13548506.2020.1826546>
- Rayner, G., Papakonstantinou, T., & Gleadow, R. (2016). Comparing the self-efficacy and writing-related abilities of native and non-native English-speaking students. *Cogent Education*, 3(1). <https://doi.org/10.1080/2331186X.2016.1179164>
- Scott, C., & Tebay, N. (2005). The West Papua conflict and its consequences for the Island of New Guinea: Root causes and the campaign for Papua, land of peace. *Round Table*, 94(382), 599–612. <https://doi.org/10.1080/00358530500331826>
- Vallade, J. I., Kaufmann, R., Frisby, B. N., & Martin, J. C. (2020). Technology acceptance model: investigating students' intentions toward adoption of immersive 360° videos for public speaking rehearsals. *Communication Education*, 0(0), 1–19. <https://doi.org/10.1080/03634523.2020.1791351>

- Vallée, D., & Ruglis, J. (2017). Student Disengagement in English-Speaking Montréal. *Educational Studies*, 53(3), 285–314. <https://doi.org/10.1080/00131946.2017.1303494>
- Viartasiwi, N. (2018). The politics of history in West Papua - Indonesia conflict. *Asian Journal of Political Science*, 26(1), 141–159. <https://doi.org/10.1080/02185377.2018.1445535>
- Wagner, P. E. (2019). Reviving thinking in a speaking course: A critical-thinking model for public speaking. *Communication Teacher*, 33(2), 158–163. <https://doi.org/10.1080/17404622.2018.1536795>
- Ward, S. (2016). It's not the same thing: Considering a path forward for teaching public speaking online. *Review of Communication*, 16(2–3), 222–235. <https://doi.org/10.1080/15358593.2016.1187458>
- Wyant, M. H., H. Hurst, E., & Reedy, J. (2020). Political Socialization of International Students: Public-Issue Discourse and Discussion on the College Campus. *Journal of Intercultural Communication Research*, 00(00), 1–22. <https://doi.org/10.1080/17475759.2020.1785529>